

LAPORAN KEUANGAN TA 2022 *AUDITED*

**KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

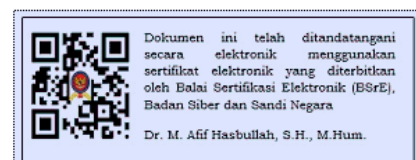
Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 19 Mei 2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya	62
VI. Lampiran dan Daftar	68

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

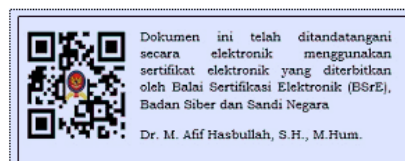
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 19 Mei 2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua KPPU,



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp111.694.117.941 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp111.694.117.941 atau mencapai 101,54 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp110.000.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.962.379.002 atau mencapai 98,76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp135.642.665.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp51.959.664.090 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp36.272.270.950, Aset Tetap (neto) sebesar Rp15.164.490.703, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp522.902.437. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.088.205.468 dan Rp48.871.458.622.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp76.236.865.178 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp107.273.936.647 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp31.037.071.469) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp449.948.814 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp30.587.122.655).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp60.751.965.550. ditambah Surplus (Defisit) LO sebesar (Rp30.587.122.655) kemudian dikurangi dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp283.444.506 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp18.423.171.221 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp48.871.458.622.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

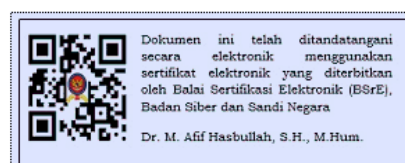
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*NETTO*)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat	31 DESEMBER 2022		% thd Angg	31 DESEMBER 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	110.000.000.000	111.694.117.941	101,54	148.645.570.171
JUMLAH PENDAPATAN		110.000.000.000	111.694.117.941	101,54	148.645.570.171
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	44.120.992.000	43.669.431.637	98,98	42.452.322.044
Belanja Barang	B.4	86.821.801.000	85.595.316.968	98,59	81.555.537.863
Belanja Modal	B.5	4.699.872.000	4.697.630.397	99,95	12.459.869.547
JUMLAH BELANJA		135.642.665.000	133.962.379.002	98,76	136.467.729.454

Jakarta, 19 Mei 2023
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Ketua KPPU,



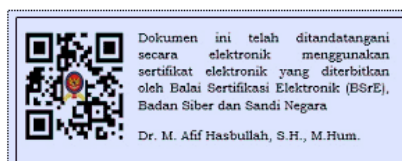
II. NERACA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Cat	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	333.759.026.398	368.465.260.494
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2	(298.201.774.915)	(324.924.057.949)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		35.557.251.483	43.541.202.545
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3	543.000.969	712.772.372
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	(400.715.969)	(528.160.340)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		142.285.000	184.612.032
Persediaan	C.5	572.734.467	640.534.960
Jumlah Aset Lancar		36.272.270.950	44.366.349.537
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.6	39.100.993.304	38.974.285.799
Aset Tetap Lainnya	C.7	3.531.167.562	5.583.219.402
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(27.467.670.163)	(25.544.532.955)
Jumlah Aset Tetap		15.164.490.703	19.012.972.246
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	1.859.577.964	1.814.577.964
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	C.10	-	200.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(1.336.675.527)	(1.095.641.751)
Jumlah Aset Lainnya		522.902.437	918.936.213
JUMLAH ASET		51.959.664.090	64.298.257.996
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	238.312.472	396.399.450
Pendapatan Diterima Dimuka	C.13	2.849.892.996	3.149.892.996
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.088.205.468	3.546.292.446
JUMLAH KEWAJIBAN		3.088.205.468	3.546.292.446
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	48.871.458.622	60.751.965.550
JUMLAH EKUITAS		48.871.458.622	60.751.965.550
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		51.959.664.090	64.298.257.996

Jakarta, 19 Mei 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,



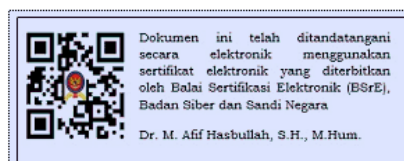
III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	76.236.865.178	103.184.921.477
Jumlah Pendapatan		76.236.865.178	103.184.921.477
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	43.669.431.637	42.452.322.044
Beban Persediaan	D.3	3.218.536.781	2.818.351.747
Beban Barang dan Jasa	D.4	35.976.892.691	35.908.064.343
Beban Pemeliharaan	D.5	4.613.838.674	4.043.363.185
Beban Perjalanan Dinas	D.6	41.805.145.139	38.683.442.696
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	4.839.444.681	4.350.724.234
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.8	(26.849.352.956)	(60.015.065.237)
Jumlah Beban		107.273.936.647	68.241.203.012
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(31.037.071.469)	34.943.718.465
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	357.067.814	(2.116.099.397)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	92.881.000	74.962.325
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		449.948.814	(2.041.137.072)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(30.587.122.655)	32.902.581.393
SURPLUS/DEFISIT – LO		(30.587.122.655)	32.902.581.393

Jakarta, 19 Mei 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,



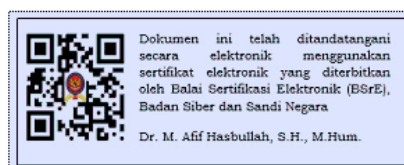
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	60.751.965.550	40.187.234.206
Surplus/(Defisit)-LO	E.2	(30.587.122.655)	32.902.581.393
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	283.444.506	(28.489.030)
Koreksi Lain-Lain	E.3.1	283.444.506	(28.489.030)
Transaksi Antar Entitas	E.4	18.423.171.221	(12.309.361.019)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	(11.880.506.928)	20.564.731.344
EKUITAS AKHIR	E.6	48.871.458.622	60.751.965.550

Jakarta, 19 Mei 2023
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengawasan kegiatan persaingan usaha yang sehat. Organisasi dan tata kerja KPPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Struktur organisasi dan tugas pokok Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Entitas berkedudukan di Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat.

KPPU mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui peran tersebut diharapkan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang sehat yang akan melahirkan efisiensi

dan mendorong timbulnya inovasi yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkomitmen dengan visi ***“Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”***

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU melaksanakan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Struktur organisasi KPPU terdiri atas:

1. Komisioner

Komisioner memiliki fungsi penanggung jawab yang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU.

2. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen

dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi.

3. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi

Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi adalah unsur penyelenggara teknis di bidang pengkajian ekonomi, analisis kebijakan publik dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

4. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum

Kedeputian Bidang Penegakan Hukum adalah unsur penyelenggara teknis di bidang penegakan hukum praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

5. Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja dalam organisasi Komisi.

6. Kepaniteraan

Kepaniteraan adalah unsur pendukung Komisi dalam penyelenggaraan Sidang Majelis Komisi dan perancangan Putusan Komisi.

7. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja adalah unsur pendukung Komisioner yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.

8. Kelompok Staf Ahli

Kelompok Staf Ahli adalah unsur pendukung Komisioner di bidang keahlian tertentu, yang berada dan bertanggung jawab kepada Komisi.

9. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di daerah.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPU. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran sampai dengan pembuatan Laporan Keuangan.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi KPPU menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPPU dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KPPU. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPPU adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

1) Pendapatan-LRA

LRA

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-

2) Pendapatan-LO

LO

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada KPPU adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Denda Persaingan Usaha diakui setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah dilakukan upaya penagihan dan/atau pemberitahuan pelaksanaan putusan.
 - 2) Pendapatan Denda Ikatan Dinas diakui setelah pegawai yang bersangkutan menerima Surat Penetapan Denda Ikatan Dinas.
 - 3) Pendapatan atas pelunasan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui setelah diterbitkan Surat Keputusan Tanda Lunas.
 - 4) Pendapatan Lain-lain diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3) Belanja

a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4) Beban

a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang Denda Persaingan Usaha diakui setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah dilakukan upaya penagihan dan/atau pemberitahuan pelaksanaan putusan.
 - b) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan	Perhitungan Penyisihan Piutang
Lancar	0,50%	30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo.
Kurang Lancar	10%	90 (sembilan puluh) hari kalender setelah kualitas piutang lancar berakhir.
Diragukan	50%	120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah kualitas piutang kurang lancar berakhir.
Macet	100%	120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah kualitas piutang diragukan berakhir.

Aturan perhitungan kebijakan penyisihan piutang tersebut diatas mulai berlaku pada 14 Desember 2022 sesuai dengan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada 1 Januari 2021 sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, aturan perhitungan kebijakan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2021

Kualitas Piutang	Penyisihan	Perhitungan Penyisihan Piutang
Lancar	0,50%	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.
Kurang Lancar	10%	90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang pertama (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).

Kualitas Piutang	Penyisihan	Perhitungan Penyisihan Piutang
Diragukan	50%	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang kedua (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).
Macet	100%	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang ketiga (sejak surat diterima oleh pelaku usaha). Keterangan: Proses untuk pelaksanaan putusan tidak terkait dengan usaha kegiatan proses eksekusi, sehingga tidak perlu dicantumkan pada penentuan kualitas piutang.

- 4) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 untuk Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin.
 - b) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 untuk Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan.

- c) Pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.
- 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- 5) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang

d) Piutang Jangka Panjang

Jangka

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Panjang

Aset Lainnya

e) Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset Tak Berwujud, Aset Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (kemitraan), Kas yang Dibatasi Penggunaannya, Deposit

Apartemen yang belum disetorkan ke Kas Negara.

- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 5) Deposit apartemen merupakan dana yang tersimpan di pemilik. Dana tersebut dapat digunakan apabila terdapat kekurangan pembayaran layanan daya dan jasa, kerusakan serta kehilangan pada fasilitas apartemen. Sesuai dengan yang diatur dalam SPK Perjanjian Sewa Apartemen, deposit dapat dikembalikan ke Kas Negara maksimal 60 hari kalender.

Kewajiban

6) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6 Dampak Pandemi COVID-19

*Dampak
Pandemi
COVID-19*

Tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak dari Pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi anggaran dan realisasi KPPU termasuk proyeksi penerimaan PNBPN serta tingkat ketertagihan Piutang Bukan Pajak KPPU TA 2022.

A.7 Capaian Output Strategis dan LRA Belanja COVID-19

Capaian

Capaian Output Strategis KPPU selama TA 2022 (rincian terlampir):

Output

Capaian Output Strategis

Strategis dan

LRA Belanja

Covid-19

No	Sasaran Strategis (SS)/	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Indikator Kinerja SS							(%)
1.	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat							
1.1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1 – 7)	34.778.671.000	34.092.838.578	98,03%	Indeks	4,7	4,87	103,62%
1.2	Persentase penyelesaian proses penegakan Hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku							
2.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui <i>e-government</i> dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal							
2.1	Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan <i>e-government</i> (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data skala 1-100)	100.863.994.000	99.921.783.352	99,07%	Indeks	79	77,81	98,49%

Rincian Laporan Realisasi Belanja Khusus Akun Covid-19 KPPU selama TA 2022:

Realisasi Belanja Khusus Akun Covid-19

(Dalam Rupiah)

KODE	ANGGARAN	REALISASI BELANJA			%	SISA ANGGARAN
		BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
521131	1.071.808.000	1.042.393.166	1.140	1.042.392.026	97,26	29.415.974
521241	150.000	150.000	-	150.000	100	-
522192	211.823.000	208.355.096	-	208.355.096	98,36	3.467.904

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Selama periode berjalan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah
Pos Laporan melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA
Realisasi Anggaran awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Anggaran 2022 Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.000.000.000	110.000.000.000
Jumlah Pendapatan	14.000.000.000	110.000.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	44.120.992.000	44.120.992.000
Belanja Barang	54.888.656.000	86.821.801.000
Belanja Modal	717.000.000	4.699.872.000
Jumlah Belanja	99.726.648.000	135.642.665.000

Rincian Perubahan Target PNBPN

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	Dasar Hukum	Tanggal
Semula	14.000.000.000	DIPA	17 November 2021
Revisi 6 DIPA	40.000.000.000	DIPA	10 Juni 2022
Revisi 8 DIPA	80.000.000.000	DIPA	24 Agustus 2022
Revisi 12 DIPA	110.000.000.000	DIPA	27 Oktober 2022

Rincian Perubahan Anggaran Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	DIPA Awal	Revisi 6 DIPA	Revisi 8 DIPA	Revisi 12 DIPA
	17 November 2021	10 June 2022	24 Agustus 2022	27 Oktober 2022
Belanja RM	93.566.648.000	93.566.648.000	93.566.648.000	88.718.842.000
Belanja PNBPN	6.160.000.000	17.349.000.000	34.549.000.000	46.923.823.000
Total Pagu	99.726.648.000	110.915.648.000	128.115.648.000	135.642.665.000

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-315/AG/AG.3/2022 Tanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Revisi Anggaran KPPU, KPPU melakukan revisi penambahan pagu penggunaan PNBP dari semula Rp6.160.000.000 menjadi sebesar Rp17.349.000.000. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPPU Kembali melakukan revisi penambahan pagu penggunaan PNBP dari semula Rp17.349.000.000 menjadi sebesar Rp34.549.000.000 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-482/AG/AG.3/2022 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2022. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPPU Kembali melakukan revisi penambahan pagu penggunaan PNBP dari semula Rp34.549.000.000 menjadi sebesar Rp46.923.823.000 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-719/AG/AG.3/2022 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2022.

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp111.694.117.941

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp111.694.117.941 atau mencapai 101,54 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp110.000.000.000. Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp111.694.117.941 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	110.000.000.000	111.694.117.941	101,54
Jumlah	110.000.000.000	111.694.117.941	101,54

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 24,86 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	111.694.117.941	148.645.570.171	(36.951.452.230)	(24,86)
Jumlah	111.694.117.941	148.645.570.171	(36.951.452.230)	(24,86)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp111.694.117.941

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp111.694.117.941 dan Rp148.645.570.171. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami penurunan sebesar 24,86 persen dari TA 2021 hal ini terjadi karena tingkat kesadaran dari Pelaku Usaha atas implementasi UU Nomor 5 Tahun 1999. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	111.694.117.941	148.645.570.171	(36.951.452.230)	(24,86)
Jumlah	111.694.117.941	148.645.570.171	(36.951.452.230)	(24,86)

Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan PNBP Lainnya

Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	414.679.009	43.000.999	371.678.010	864,35
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	2.824.600	1.598.000	1.226.600	76,76
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	252.841.460	40.747.398	212.094.062	520,51
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	79.698.750	15.367.000	64.331.750	418,64
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	110.736.820.422	148.460.883.992	(37.724.063.570)	(25,41)
Pendapatan Denda Lainnya	112.840.000	-	112.840.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	89.889.700	82.334.545	7.555.155	9,18
Pendapatan Anggaran Lain- Lain	4.524.000	1.053.237	3.470.763	329,53
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	585.000	(585.000)	(100,00)
Jumlah	111.694.117.941	148.645.570.171	(36.951.452.230)	(24,86)

B.2 Belanja

Belanja

Rp133.962.379.002

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.962.379.002 atau 98,76 persen dari anggaran belanja sebesar Rp135.642.665.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

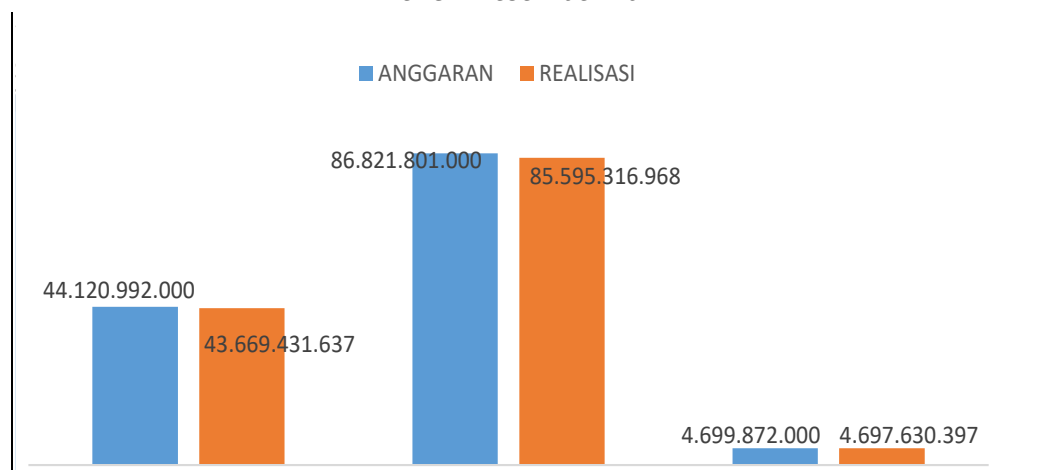
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	44.120.992.000	43.669.431.637	98,98
Belanja Barang	86.821.801.000	85.595.316.968	98,59
Belanja Modal	4.699.872.000	4.697.630.397	99,95
Jumlah	135.642.665.000	133.962.379.002	98,76

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Grafik A. Komposisi Realisasi Belanja Negara Neto
Per 31 Desember 2022*



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 1,84 persen karena pagu mengalami penurunan. Berikut rincian realisasi belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Belanja Pegawai	43.669.431.637	42.452.322.044	1.217.109.593	2,87
Belanja Barang	85.595.316.968	81.555.537.863	4.039.779.105	4,95
Belanja Modal	4.697.630.397	12.459.869.547	(7.762.239.150)	(62,30)
Jumlah	133.962.379.002	136.467.729.454	(2.505.350.452)	(1,84)

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp43.669.431.637*

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp43.669.431.637 atau 98,98 persen dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp44.120.992.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Uang Honor Tetap	43.753.792.000	43.624.581.650	99,70
Pengembalian Belanja	-	(9.842.013)	(100,00)
Belanja Uang Lembur	367.200.000	54.692.000	14,89
Jumlah Belanja	44.120.992.000	43.669.431.637	98,98

Pagu anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp44.120.992.000 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2021.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp43.669.431.637 sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp42.452.322.044. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 tersebut

mengalami peningkatan sebesar 2,87 persen dibandingkan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dikarenakan adanya kenaikan berkala sesuai dengan penilaian kinerja pegawai.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Belanja Uang Honor Tetap	43.624.581.650	42.454.556.044	1.170.025.606	2,76
Pengembalian Belanja Pegawai	(9.842.013)	(2.234.000)	(7.608.013)	340,56
Jumlah Belanja Bersih	43.614.739.637	42.452.322.044	1.162.417.593	2,74
Belanja Uang Lembur	54.692.000	-	54.692.000	100,00
Jumlah Belanja Bersih	43.669.431.637	42.452.322.044	1.217.109.593	2,87

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp85.595.316.968*

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp85.595.316.968 atau 98,59 persen dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp86.821.801.000 Rincian pagu anggaran dan realisasi

Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Pagu dan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang Operasional	3.782.632.000	3.706.417.211	97,99
Belanja Barang Non Operasional	3.542.334.000	3.409.333.798	96,25
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.337.167.000	3.337.085.649	99,99
Belanja Jasa	29.128.249.000	28.965.280.273	99,44
Belanja Pemeliharaan	4.465.308.000	4.368.575.790	97,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	42.532.097.000	41.893.824.566	98,50
Belanja Perjalanan Luar Negeri	34.014.000	34.013.564	99,99
Jumlah Belanja kotor	86.821.801.000	85.714.530.851	98,72
Pengembalian Belanja Barang	-	119.213.883	100,00
Jumlah Belanja	86.821.801.000	85.595.316.968	98,59

Pagu anggaran Belanja Barang Tahun 2022 sebesar Rp86.821.801.000 mengalami peningkatan sebesar Rp3.866.741.000 dari Tahun 2021 sebesar Rp82.955.060.000. Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,66 persen dibandingkan Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun 2021.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp85.595.316.968 mengalami peningkatan sebesar Rp4.039.779.105 dari Tahun 2021 sebesar Rp81.555.537.863. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,95 persen dibandingkan realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dikarenakan adanya kenaikan pagu atau anggaran dari tahun lalu. Sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 KPPU melakukan pencegahan penyebaran virus dengan menyediakan masker, *hand sanitizer* dan disinfektan serta KPPU juga meminimalisir

belanja barang operasional dan non operasional. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Belanja Barang Operasional	3.706.417.211	3.478.490.270	227.926.941	6,55
Belanja Barang Non Operasional	3.409.333.798	3.433.893.777	(24.559.979)	(0,72)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.337.085.649	2.971.221.470	365.864.179	12,31
Belanja Jasa	28.965.280.273	29.064.681.555	(99.401.282)	(0,34)
Belanja Pemeliharaan	4.368.575.790	3.927.705.695	440.870.095	11,22
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	41.893.824.566	39.054.093.591	2.839.730.975	7,27
Belanja Perjalanan Luar Negeri	34.013.564	-	34.013.564	100,00
Jumlah Belanja Kotor	85.714.530.851	81.930.086.358	3.784.444.493	4,62
Pengembalian Belanja Barang	119.213.883	374.548.495	(255.334.612)	(68,17)
Jumlah Belanja	85.595.316.968	81.555.537.863	4.039.779.105	4,95

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp4.697.630.397*

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.697.630.397 atau 99,95 persen dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp4.699.872.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.856.022.000	2.853.954.897	99,93
Belanja Modal Lainnya	1.843.850.000	1.843.675.500	99,99
Jumlah Belanja	4.699.872.000	4.697.630.397	99,95

Pagu anggaran Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp4.699.872.000 mengalami penurunan sebesar Rp9.514.698.000 dari Tahun 2021 sebesar Rp14.214.570.000. Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar 66,94 persen dibandingkan Pagu Belanja Modal Tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan pagu atau anggaran dari tahun lalu.

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

URAIAN	PAGU ANGGARAN		PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	2022	2021		
Belanja Modal	4.699.872.000	14.214.570.000	(9.514.698.000)	(66,94)
Jumlah Belanja	4.699.872.000	14.214.570.000	(9.514.698.000)	(66,94)

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.697.630.397 mengalami penurunan sebesar Rp7.762.239.150. Sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.459.869.547 Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar 62,30 persen dibandingkan realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan pagu atau anggaran dari tahun lalu. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.853.954.897	9.281.714.950	(6.427.760.053)	(69,25)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.753.372.500	(1.753.372.500)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	1.843.675.500	1.424.782.097	418.893.403	29,40
Jumlah Belanja	4.697.630.397	12.459.869.547	(7.762.239.150)	(62,30)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp2.853.954.897*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.853.954.897 dan Rp9.281.714.950, mengalami penurunan sebesar Rp6.427.760.053, atau sebesar 69,25 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 dikarenakan adanya penurunan pagu atau anggaran dari tahun lalu.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.853.954.897	9.281.714.950	(6.427.760.053)	(69,25)
Jumlah Belanja	2.853.954.897	9.281.714.950	(6.427.760.053)	(69,25)

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya
Rp1.843.675.500

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.843.675.500 dan Rp1.424.782.097 mengalami Kenaikan sebesar Rp418.893.403 atau sebesar 29,40 persen dibandingkan Realisasi TA 2021 dikarenakan adanya kenaikan pagu atau anggaran dari tahun lalu.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya.
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI	REALISASI	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021		
Belanja Modal Lainnya	1.843.675.500	1.424.782.097	418.893.403	29,40
Jumlah Belanja	1.843.675.500	1.424.782.097	418.893.403	29,40

Realisasi Belanja Modal Lainnya tersebut salah satunya untuk pekerjaan pelaksanaan paket Pengadaan Renovasi Kantor KPPU wilayah Jawa Barat. Atas pekerjaan pengadaan renovasi tersebut, KPPU telah melakukan proses Transfer Keluar kepada Kementerian Keuangan c.q. Gedung Keuangan Negara Bandung (Kode Satker 409308) dan sudah dibuat BAST Nomor BAST-03/KPPU/SJ/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Keputusan Nomor 129/SJ/Kep/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp3.712.359.000.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan

Pajak

Rp333.759.026.398

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp333.759.026.398 dan Rp368.465.260.494. Terjadi penurunan nilai Piutang Bukan Pajak sebesar (Rp34.706.234.096) yang disebabkan banyaknya debitur yang telah membayar dan usaha penagihan yang signifikan dari Biro Hukum. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

JENIS PIUTANG	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	PENURUNAN/ KENAIKAN	%
Piutang Lainnya	93.498.198	74.889.700	18.608.498	24,85
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	333.665.528.200	368.390.370.794	(34.724.842.594)	(9,43)
Jumlah	333.759.026.398	368.465.260.494	(34.706.234.096)	(9,42)

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak KPPU berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 disebutkan bahwa Komisi

berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. Dengan demikian, KPPU mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk denda.

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Dalam pencatatan Piutang Bukan Pajak, KPPU berpedoman pada peraturan yang berlaku terkait dengan pencatatan piutang bukan pajak, antara lain PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, PMK Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Namun demikian, pencatatan Piutang Negara Bukan Pajak pada KPPU tetap disesuaikan dengan kondisi piutang yang dikelola KPPU dan koridor yang digariskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Sesuai dengan rekomendasi BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan KPPU TA 2016, maka KPPU telah menyusun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di

Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Kebijakan Akuntansi tersebut salah satunya mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Piutang KPPU yang bersifat spesifik. Selanjutnya telah dilakukan perubahan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku di KPPU, dan dilakukan perubahan kembali dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Mutasi Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	368.465.260.494
Mutasi Tambah:	
- Penambahan Putusan Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha	76.011.977.828
- Penambahan Piutang Lainnya	93.498.198
Mutasi Kurang:	
- Pembayaran Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha	110.736.820.422
- Pembayaran Piutang Lain-Lain	74.889.700
Saldo Per 31 Desember 2022	333.759.026.398

Mutasi transaksi penambahan dan pengurang piutang bukan pajak sebagai berikut:

- 1) Terdapat penambahan Piutang Bukan Pajak berupa:
 - a) Penambahan putusan denda persaingan usaha yang telah *inkracht* per 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp76.011.977.828
 - b) Penambahan piutang Lain-lain berupa penyetoran deposit apartemen dan setoran TAYL sebesar Rp93.498.198

2) Terdapat pengurangan Piutang Bukan Pajak berupa:

- a) Pembayaran piutang denda pelanggaran persaingan usaha dari pelaku usaha per 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp110.736.820.422. Nilai tersebut dilakukan dengan cara mengangsur dan lunas.
- b) Pembayaran piutang lainnya yang terdiri atas penyetoran pengembalian belanja TA 2021 yang baru disetorkan ke kas Negara pada Tahun 2022 sebesar Rp74.889.700

C.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak
Rp298.201.774.915

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp298.201.774.915 dan Rp324.924.057.949. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	5.096.636.879	0,50%	25.483.184
Kurang Lancar	30.394.313.044	10%	3.039.431.304
Diragukan	6.262.432.098	50%	3.131.216.049
Macet	292.005.644.377	100%	292.005.644.377
Jumlah	333.759.026.398		298.201.774.915

C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp543.000.969 dan Rp712.772.372. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/ TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Nama	31 Desember 2022	31 Desember 2021	%
Bagian Lancar TP/TGR	543.000.969	712.772.372	(23,82)
Jumlah	543.000.969	712.772.372	(23,82)

Piutang Tagihan TP/TGR di KPPU berasal dari:

- 1) Denda Ikatan dinas yang dikenakan KPPU kepada para pegawai yang mengundurkan diri dari KPPU selama masa ikatan dinas pegawai yang bersangkutan belum berakhir. Para pegawai tersebut wajib membayar ke kas negara sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dengan KPPU. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp511.456.369.
- 2) TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2016 sebesar Rp7.792.875. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp912.500.

- 3) TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2017 sebesar Rp103.212.000. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.250.000.
- 4) TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2019 sebesar Rp27.460.357. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.382.100.

Beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait Piutang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pencatatan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengikuti peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam C.1 Piutang Bukan Pajak;
- 2) Berdasarkan masa jatuh tempo, Piutang Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Hal tersebut didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 3) Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan ke dalam piutang jangka pendek dibukukan di Neraca sebagai akun Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (aset lancar). Sedangkan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan

hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan ke dalam piutang jangka panjang dibukukan di Neraca sebagai akun Tagihan TR/TGR (Aset Lainnya);

- 4) Pengukuran Piutang sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Piutang, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Perhitungan penyisihan piutang untuk Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengacu kepada PMK Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila sampai dengan penagihan ketiga, debitur tidak melakukan pelunasan pembayaran TGR dan denda ikatan dinas, maka KPPU dapat melimpahkan penagihannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Kementerian Keuangan.

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp400.715.969 dan Rp528.160.340. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi
Rp400.715.969

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	143.000.000	0,5%	715.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	400.000.969	100%	400.000.969
Jumlah	543.000.969		400.715.969

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp572.734.467 dan Rp640.534.960. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

Persediaan
Rp572.734.467

kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

JENIS	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Barang Konsumsi	553.327.347	625.384.435	(11,52)
Bahan untuk Pemeliharaan	18.372.120	15.150.525	21,26
Bahan Baku	1.035.000	-	100,00
Jumlah	572.734.467	640.534.960	(10,58)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.6 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp39.100.993.304*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp39.100.993.304 dan Rp38.974.285.799.

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	38.974.285.799
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.853.954.897
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	2.727.247.392
Saldo per 31 Desember 2022	39.100.993.304
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	27.404.420.163
Nilai Buku per 31 Desember 2022	11.696.573.141

Mutasi tambah berupa pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Alat Angkut sebesar Rp670.117.758

- 2) Alat Kantor sebesar Rp229.336.213
- 3) Alat Rumah Tangga sebesar Rp1.093.914.098
- 4) Alat Studio sebesar Rp181.220.020
- 5) Unit Alat Laboratorium Rp5.955.000
- 6) Komputer Unit Rp522.848.668
- 7) Peralatan Komputer sebesar Rp144.563.140
- 8) Unit alat Proses/Produksi Rp6.000.000

Mutasi kurang berupa penghentian Aset dari Penggunaan:

- 1) Alat Angkutan sebesar Rp797.575.000
- 2) Alat ukur sebesar Rp5.830.000
- 3) Alat Kantor sebesar Rp119.734.423
- 4) Alat Rumah Tangga sebesar Rp264.265.760
- 5) Alat Studio sebesar Rp19.042.700
- 6) Alat Komunikasi sebesar Rp2.085.000
- 7) Unit Alat Laboratorium sebesar Rp1.900.000
- 8) Alat Laboratorium Fisika, Nuklir/Elektronika sebesar Rp134.400.000
- 9) Komputer unit sebesar Rp1.261.476.641
- 10) Peralatan Komputer sebesar Rp120.937.868.

C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp3.531.167.562*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp3.531.167.562 dan Rp5.583.219.402. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	5.583.219.402
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.798.675.500
Batal Transfer Keluar	3.845.089.840
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya	5.637.500
Transfer Keluar	3.845.089.840
Batal Transfer Keluar	3.845.089.840
Saldo per 31 Desember 2022	3.531.167.562
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	63.250.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3.467.917.562

Terdapat mutasi tambah berupa pembelian sebagai berikut:

- 1) Renovasi Gedung Kanwil III sebesar Rp1.788.849.500.
- 2) Pembelian Bahan Perpustakaan sebesar Rp9.826.000
- 3) Batal Transfer Keluar sebesar Rp3.845.089.840 merupakan transaksi batal transfer keluar atas aset tetap renovasi kepada Universitas Lampung dan Aset tetap Renovasi Gedung Kanwil III Jalan Aceh Nomor 52 Bandung. Hal ini terjadi karena perbedaan periode pencatatan transaksi transfer keluar dan transfer masuk tidak dapat dilakukan pada aplikasi sakti sehingga dilakukan pembatalan transfer keluar.

Adapun mutasi tambah pada aset tetap renovasi adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Pada Aset Tetap Renovasi

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap Renovasi	Tahun Perolehan	Nilai
1	Renovasi Gedung Kanwil III Jl. Aceh Nomor 52 Bandung	2021-2022	3.712.359.000
2	Renovasi Pojok Persaingan Usaha Universitas Lampung	2019	132.730.840

Terdapat mutasi kurang berupa transfer keluar dan reklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp5.637.500.
- 2) Renovasi Gedung Kanwil III sebesar Rp3.712.359.000.
- 3) Renovasi Pojok Persaingan Usaha Universitas Lampung Rp132.730.840.
- 4) Batal Transfer Keluar sebesar Rp3.845.089.840 merupakan transaksi batal transfer keluar atas aset tetap renovasi kepada Universitas Lampung dan Aset tetap Renovasi Gedung Kanwil III Jalan Aceh Nomor 52 Bandung. Hal ini terjadi karena perbedaan periode pencatatan transaksi transfer keluar dan transfer masuk tidak dapat dilakukan pada aplikasi sakti sehingga dilakukan pembatalan transfer keluar.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp27.467.670.163*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp27.467.670.163 dan Rp25.544.532.955. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	39.100.993.304	27.404.420.163	11.696.573.141
2	Aset Tetap Lainnya	3.531.167.562	63.250.000	3.467.917.562
Total		42.632.160.866	27.467.670.163	15.164.490.703

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a) Gedung dan Bangunan;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan Alat Musik Modern.

C.9 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp1.859.577.964

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.859.577.964 dan Rp1.814.577.964 terjadi kenaikan hal tersebut dikarenakan adanya pembelian *software*. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa *Software*.

Mutasi Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	1.814.577.964
Mutasi tambah:	
Pembelian	45.000.000
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2022	1.859.577.964
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1.336.675.527)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	522.902.437

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp45.000.000 berupa pembelian 2 unit

software. Tidak ada mutasi kurang sampai dengan 31 Desember 2022.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari:

Rincian Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Barang	Tgl. Perolehan	Asal Perolehan	Rupiah Aset
1	Aplikasi AIM	04-11-2010	CV Aldhiya Tama Solusi	12.000.000
2	Aplikasi Data Management System	06-12-2011	PT. Inspira Media Solusi	49.000.000
3	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	35.000.394
4	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	36.346.563
5	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	39.279.900
6	Sistem Katalog online	14-05-2012	PT.Prima Dua Jaya	34.237.500
7	Software Manajemen BMN KPPU	13-05-2013	CV. Yonet Nusantara	57.050.000
8	Aplikasi Persidangan	23-12-2014	CV RAUDAH GULISTAN	37.500.000
9	Website KPD	12-06-2014	Tenaga Ahli Website	123.476.600
10	Sisitem Informasi Layanan Umum	31-08-2015	CV Raudah Gulistan	36.850.000
11	Windows server Standart 2012 R2	01-10-2015	PT Rajawali Network	15.695.706
12	Sistem Informasi Monitoring Piutang KPPU	06-11-2015	CV. Raudah Gulistan	14.300.000
13	Windows Server	11-12-2015	PT Mitra Teknologi	13.255.000
14	Aplikasi Kemitraan	17-07-2017	PT Enindo Mitratama	283.990.000
15	Aplikasi Teamviewer	19-07-2017	PT Bhineka	24.961.200
16	Aplikasi Notifikasi Merger	05-12-2017	Consultan	60.000.000
17	Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan	09-10-2019	PT Cahaya Anugerah	48.807.000
18	Software Eviews 12 Standart	11-12-2020	PT Panca Putra	37.400.000
19	Software Microsoft Office Std 2019	31-12-2020	PT XL Planet	77.000.000
20	Software Microsoft MAC Std 2019	31-12-2020	PT XL Planet	90.464.000
21	Software Aplikasi Pengelolaan Kerjasama	11-12-2020	Agung Riyadi	44.800.000
22	Software Aplikasi Manajemen Pemeriksaan	28-12-2020	CV Putra	66.000.000
23	Software Microsoft MAC Std 2019	10-05-2021	PT Multi Sarana	7.000.000
24	Software Microsoft Office Std 2019	17-05-2021	PT Multi Sarana	6.400.000
25	Software Microsoft Office Std 2019	17-05-2021	PT Multi Sarana	7.607.600
26	Eviews (Software Statistik)	15/10/2021	CV. Bersaudara	28.606.501
27	IBM SPSS (Software Statistik)	15/10/2021	CV. Bersaudara	250.800.000
28	Software DEA	15/10/2021	CV. Bersaudara	34.650.000
29	Adobe Photoshop Creativ	21/10/2021	CV. Aditama Citra	9.500.000
30	Software Absen Terintegrasi	16/12/2021	PT. Cakranegara	67.000.000
31	Windows 10 Pro	15/12/2021	PT. Sikamali	3.750.000
32	Windows Server 2019	15/12/2021	PT. Sikamali	18.000.000
33	Software VMIX 4K	15/12/2021	PT. Sikamali	12.000.000
34	Manager Engine OP Manager Plus Edition	23/12/2021	PT. Printcom	117.700.000
35	Filmora x Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	2.000.000
36	Coreldraw Graphic Suite Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	5.400.000
37	Easeus Partition Technician Edition Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	3.500.000
38	Easeus Data Recovery Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	1.150.000
39	Internet Download Manager Lifetime	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	1.000.000
40	Rar Extractor Expert Pro Macbook	31/12/2021	PT. Neo Dinamika	1.100.000
41	Pembuatan Website PPID	30/09/2022	CV Felia Gemilang	30.000.000
42	Adobe Ilustration dan Adobe Photoshop	30/09/2022	CV Felia Gemilang	15.000.000
Total				1.859.577.964

C.10 Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi

Dana
Penjaminan
Pihak Ketiga
Retensi Rp0
Dana Penjaminan
Pihak Ketiga
Retensi Rp0

Saldo Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp200.000.000. Untuk pelaporan Keuangan pada Tahun 2022 KPPU telah mengimplementasikan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha per tanggal 14 Desember 2022 bahwa pencatatan atas jaminan diungkapkan di dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp1.336.675.527 dan Rp1.095.641.751. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022*

(Dalam Rupiah)

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	1.859.577.964	(1.336.675.527)	522.902.437
Jumlah	1.859.577.964	(1.336.675.527)	522.902.437

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp238.312.472 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp238.312.472 dan Rp396.399.450. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya

dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	227.812.472	185.899.450	22,55
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	10.500.000	10.500.000	-
Dana Pihak Ketiga	-	200.000.000	(100,00)
Jumlah	238.312.472	396.399.450	(39,88)

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga di KPPU terdiri dari kewajiban Negara dalam mengembalikan kelebihan setoran pembayaran denda persaingan usaha, denda ikatan dinas dan tagihan kepada pihak ketiga. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup KPPU per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Putusan Nomor 30/KPPU-L/2020	5.000.000
2	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Putusan Nomor 11/KPPU-L/2014	5.000.000
3	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Ikatan Dinas atas nama Desi Dwi Bastian	500.000
4	Akkrual Daya dan Jasa Kantor Pusat dan Kantor Wilayah	227.812.472
Total		238.312.472

C.13 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp2.849.892.996

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.849.892.996 dan Rp3.149.892.996. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Pendapatan Diterima Dimuka	2.849.892.996	3.149.892.996	(9,52)
Jumlah	2.849.892.996	3.149.892.996	(9,52)

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pembayaran dari Pelaku Usaha atas denda pelanggaran persaingan usaha putusan Nomor 07/KPPU-L/2015, namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan putusan sebagaimana dimaksud masih dalam upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

(Dalam Rupiah)

Nama	Nilai	No. Putusan
PT Kentjana Sakti Indonesia	176.764.000	07/KPPU-L/2015
PT Citra Mahasurya Industries	1.821.204.996	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	851.924.000	07/KPPU-L/2015
Total	2.849.892.996	

C.14 Ekuitas

Ekuitas
Rp48.871.458.622

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp48.871.458.622 dan Rp60.751.965.550. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp76.236.865.178 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.236.865.178 dan Rp103.184.921.477. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 26,12 persen, dikarenakan penurunan putusan inkracht yang telah diterima salinan putusannya di periode tahun 2022. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	2.824.600	1.598.000	76,76
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	73.603.254.880	103.166.903.240	(28,66)
Pendapatan Denda Lainnya	2.546.562.948	-	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	79.698.750	15.367.000	418,64
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	4.524.000	1.053.237	329,53
Jumlah	76.236.865.178	103.184.921.477	(26,12)

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp43.669.431.637 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp43.669.431.637 dan Rp42.452.322.044.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 2,87 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan karena adanya kenaikan berkala sesuai dengan penilaian kinerja pegawai.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Uang Honor Tetap	43.669.431.637	42.452.322.044	2,87
Jumlah	43.669.431.637	42.452.322.044	2,87

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp3.218.536.781*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.218.536.781 dan Rp2.818.351.747.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,20 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan karena adanya kenaikan pagu anggaran belanja persediaan konsumsi.

Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember Tahun 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Persediaan konsumsi	3.216.811.781	2.818.351.747	14,14
Beban Persediaan Bahan Baku	1.725.000	-	100,00
Jumlah	3.218.536.781	2.818.351.747	14,20

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp35.976.892.691*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp35.976.892.691 dan Rp35.908.064.343.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan belanja barang dan jasa KPPU diperoleh dari tambahan alokasi PNBPN. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.301.926.554	982.332.216	32,53
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	173.304.410	158.368.150	9,43
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	388.662.482	367.462.179	5,77
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	384.485.000	473.429.500	(18,79)
Beban Barang Operasional Lainnya	379.617.150	368.916.700	2,90

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Operasional - Penanganan COVID-19	1.043.951.734	1.177.843.547	(11,37)
Beban Bahan	2.067.283.798	1.314.174.177	57,31
Beban Honor Output Kegiatan	1.309.680.000	2.113.070.000	(38,02)
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	150.000	5.367.500	(97,21)
Beban Langganan Listrik	1.325.769.820	1.144.154.564	15,87
Beban Langganan Telepon	811.276.274	652.424.526	24,35
Beban Langganan Air	77.739.586	43.079.999	80,45
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.829.702	86.292.498	(17,92)
Beban Jasa Konsultan	1.951.063.550	2.949.549.000	(33,85)
Beban Sewa	8.315.825.717	8.444.653.955	(1,53)
Beban Jasa Profesi	3.351.553.000	2.872.470.000	16,68
Beban Jasa Lainnya	12.783.228.818	12.381.500.891	3,24
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	208.355.096	372.204.941	(44,02)
Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	32.190.000	770.000	4080,52
Jumlah	35.976.892.691	35.908.064.343	0,19

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp4.613.838.674

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.613.838.674 dan Rp4.043.363.185.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,11 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 dikarenakan adanya penambahan pagu.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.364.591.400	2.115.208.207	11,79
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	84.777.324	21.194.331	300,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.978.120.589	1.791.303.157	10,43
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	186.349.361	115.657.490	61,12
Jumlah	4.613.838.674	4.043.363.185	14,11

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp41.805.145.139*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp41.805.145.139 dan Rp38.683.442.696. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,07. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Perjalanan Biasa	29.691.009.108	28.223.304.629	5,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	509.600.000	317.734.000	60,39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82.493.450	106.995.000	(22,90)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.488.801.582	10.035.409.067	14,48
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	33.240.999	-	100,00
Jumlah	41.805.145.139	38.683.442.696	8,07

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp4.839.444.681

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.839.444.681 dan Rp4.350.724.234.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa Aset Tetap yang menjadi objek penyusutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 dengan menggunakan Metode Garis Lurus.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.543.067.155	4.125.927.488	10,11
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	55.343.750	7.906.250	600,00
<i>Jumah Penyusutan</i>	4.598.410.905	4.133.833.738	11,24
Beban Amortisasi Software	241.033.776	216.890.496	11,13
<i>Jumlah Amortisasi</i>	241.033.776	216.890.496	11,13
Jumlah	4.839.444.681	4.350.724.234	11,23

Kenaikan Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 terjadi karena terdapat penambahan pada Peralatan dan Mesin.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp26.849.352.956) Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp26.849.352.956) dan (Rp60.015.065.237). hal yang mempengaruhi saldo beban penyisihan piutang tak tertagih menjadi minus karena adanya pembayaran piutang oleh debitur yang sebelumnya dinyatakan sebagai piutang macet, sehingga perubahan kualitas piutang berdampak pada saldo beban.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	(26.722.376.076)	(60.015.269.046)	(55,47)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	467.491	110.468	323,19
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(2.046.096)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(127.444.371)	2.139.437	(6056,91)
Jumlah	(26.849.352.956)	(60.015.065.237)	(55,26)

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar (Rp357.067.814) Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp357.067.814 dan (Rp2.116.099.397).

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	414.679.009	43.000.999	864,35
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(57.611.195)	(2.159.100.396)	(97,33)
Jumlah	357.067.814	(2.116.099.397)	(116,87)

D.10 Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus (Defisit)

Dari Kegiatan Non

Operasional

Rp92.881.000

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp92.881.000 dan Rp74.962.325.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	75.000.000	72.000.000	4,17
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.000.000	2.962.325	406,36
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	2.881.000	-	100,00
Jumlah	92.881.000	74.962.325	23,90

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp60.751.965.550

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp60.751.965.550 dan Rp40.187.234.206.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO
(Rp.30.587.122.655)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp30.587.122.655) dan Rp32.902.581.393. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus (defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Entitas

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Entitas
- Rp.283.444.506

Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp283.444.506 dan (Rp28.489.030).

E.3.1 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain
Rp283.444.506

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp283.444.506 dan (Rp28.489.030). Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Penyesuaian atas Nilai Piutang PT. Citra Prima Sejati	300.000.000
Koreksi atas Nilai Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(6.936.079)
Koreksi Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang mendapatkan <i>crash</i> program atas nama Rindu Rescuemha	(10.967.762)
Koreksi Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang mendapatkan <i>crash</i> program atas nama Puput Widyanarti	973.898
Koreksi atas Nilai Penyisihan Piutang Lainnya	374.449
Jumlah	283.444.506

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp18.423.171.221

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp18.423.171.221 dan (Rp12.309.361.019). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN, terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	133.962.379.002
Ditagihkan dari Entitas Lain	(111.694.117.941)
Transfer Keluar	(3.845.089.840)
Jumlah	18.423.171.221

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari
Entitas Lain (DDEL)/
Ditagihkan ke
Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp133.962.379.002, sedangkan DDEL

sebesar (Rp111.694.117.941).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
(Rp3.845.089.840)*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.845.089.840) terdiri dari:

Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Aset Tetap Renovasi Universitas Lampung	Universitas Lampung, Kementerian Dikti	132.730.840
Konsultan Perencana Gedung Jl. Aceh Bandung	GKN Bandung, Kementerian Keuangan	98.566.000
Renovasi Gedung Jl. Aceh Bandung	GKN Bandung, Kementerian Keuangan	1.753.372.500
Konsultan Pengawas Gedung Jl. Aceh Bandung	GKN Bandung, Kementerian Keuangan	35.785.500
Konsultan Pengawas Gedung Jl. Aceh Bandung	GKN Bandung, Kementerian Keuangan	35.785.500
Renovasi Gedung Jl. Aceh Bandung	GKN Bandung, Kementerian Keuangan	1.788.849.500
Jumlah		3.845.089.840

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp48.871.458.622*

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp48.871.458.622 dan Rp60.751.965.550.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA KPPU

Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 27 April 2018 perihal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 menetapkan tentang:

- 1) Pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc., dkk. (9 orang);
- 2) Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Dr. M. Afif Hasbullah, S.H.,M.Hum., dkk. (9 orang).

Atas dasar tersebut, KPPU menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPPU Nomor 28/KPPU/Kep.1/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode 3 Mei 2018 – 3 November 2020 yaitu Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Ketua KPPU serta Ukay Karyadi, S.E., M.E. sebagai Wakil Ketua KPPU dengan anggota sebagai berikut:

- 1) Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.;
- 2) Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.;
- 3) Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.;
- 4) Dinni Melanie, S.H., M.E.;
- 5) Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.;
- 6) Harry Agustanto, S.H., M.H.; dan
- 7) Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Selanjutnya disampaikan bahwa pada tanggal 5 November 2021, Ketua KPPU yaitu Bapak Kodrat Wibowo telah meninggal dunia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum terpilih pengganti Ketua KPPU. Pemilihan Ketua KPPU ditetapkan pada Februari 2022 yakni Bapak Ukay Karyadi, S.E.,M.E. sebagai Ketua Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pada tanggal 16 September 2022 Bapak M. Afif Hasbullah ditetapkan sebagai Ketua KPPU sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 34/P/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU/Kep.1/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

F.2 PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, struktur organisasi KPPU terdiri atas:

1) Anggota Komisi

Komisioner terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU

2) Sekretariat

a) Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Keuangan
- 2) Biro Hukum

- 3) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
- 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
- 5) Unit Data dan Informasi
- 6) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
- b) Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi
 - 1) Direktorat Ekonomi
 - 2) Direktorat Kebijakan Persaingan
 - 3) Direktorat Advokasi Persaingan
- c) Kedeputian Bidang Penegakan Hukum
 - 1) Direktorat Investigasi
 - 2) Direktorat Merger dan Akuisisi
 - 3) Direktorat Pengawasan Kemitraan
 - 4) Direktorat Penindakan
- 3) Kepaniteraan
- 4) Satuan Pengawasan Internal
- 5) Kantor Wilayah KPPU (Kanwil KPPU)
 - a) Kantor Wilayah I
 - b) Kantor Wilayah II
 - c) Kantor Wilayah III
 - d) Kantor Wilayah IV
 - e) Kantor Wilayah V
 - f) Kantor Wilayah VI
 - g) Kantor Wilayah VII
- 6) Dewan Pakar

- 7) Kelompok Staff Ahli
- 8) Kelompok Kerja
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

F.3 KANTOR WILAYAH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam rangka memperluas jangkauan kerja dan mendukung pelaksanaan tugas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki Kantor Perwakilan Wilayah di 7 (Tujuh) provinsi. Berikut adalah uraiannya:

1) Kantor Wilayah I Medan

Kanwil Medan bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 148B Sekip, Medan Petisah Kota Medan.

2) Kantor Wilayah II Lampung

Kanwil Lampung bertempat di Jl. Diponegoro No.40ab, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212

3) Kantor Wilayah III Bandung

Kanwil Bandung bertempat di Jl. Aceh No.52, Merdeka Kec. Sumur Bandung, Jawa Barat 40113

4) Kantor Wilayah IV Surabaya

Kanwil Surabaya bertempat di Gedung Bumi Mandiri, Jalan Basuki Rahmat No. 129-137 Lantai 7, Surabaya.

5) Kantor Wilayah V di Balikpapan

Kanwil Balikpapan bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan Lt. 3. Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 28, Balikpapan.

6) Kantor Wilayah VI Makassar

Kanwil Makassar bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai

6 Jl. Urip Sumohardjo Km.4 Makassar, Sulawesi Selatan.

7) Kantor Wilayah VII Yogyakarta

Kanwil Yogyakarta bertempat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 1, Pringgokusumon, Gedung Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55272.

Fungsi Kantor Wilayah KPPU difokuskan pada upaya pencegahan, penerimaan, klarifikasi laporan dan penegakan hukum tingkat pertama, yakni penyelidikan atau investigasi. Dalam fungsi penegakan hukum, Kantor Wilayah turut didukung oleh sumber daya di Kantor Pusat.

F.4 PUTUSAN KPPU YANG MASIH BERPROSES

Putusan KPPU yang masih berproses terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

- 1) Putusan KPPU atas perkara yang sudah *inkracht* namun belum diterima salinan putusannya.

Pada periode 31 Desember 2022, terdapat 6 perkara dengan nilai denda sebesar Rp27.295.973.000 yang putusannya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI namun belum diterima salinan putusannya.

- 2) Putusan KPPU yang masih dalam proses keberatan/banding/kasasi.

Pada periode 31 Desember 2022, rincian putusan KPPU yang masih dalam proses keberatan/banding/kasasi adalah sebagai berikut:

- a) terdapat 1 perkara dengan nilai denda sebesar Rp4.030.000.000 yang masih berproses keberatan di tingkat Keberatan di Pengadilan Niaga
- b) terdapat 4 perkara dengan nilai denda sebesar Rp40.104.303.0000 yang masih berproses kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI.

F.5 JAMINAN

Jaminan adalah agunan yang diberikan terlapor dalam rangka pelaksanaan putusan Komisi. Jaminan di lingkungan KPPU terbagi atas 2 (dua):

1) Jaminan Bank

Dalam hal terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima putusan. Jaminan bank sebagaimana maksud paling banyak 20% dari nilai denda sebagaimana tercantum didalam amar putusan Komisi.

2) Jaminan Kelonggaran Pembayaran Denda

Merupakan jaminan yang diajukan khusus untuk permohonan kelonggaran pembayaran denda lebih dari 12 (dua belas) bulan. Jaminan paling sedikit memiliki nilai yang sama dengan piutang denda yang harus dibayar oleh terlapor.

Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat Jaminan bank dalam Proses Keberatan yang sudah diserahkan ke KPPU, adapun rincian sebagai berikut:

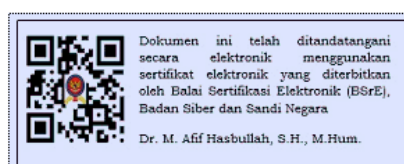
Rincian Jaminan Bank

(Dalam Rupiah)

No	Nama PT	Uraian	Nilai Denda	Nilai Jaminan
1	PT Cipta Karya Multi Teknik	Putusan Nomor 25/KPPU-1/2020	2.700.000.000	540.000.000

Jakarta, 19 Mei 2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,



DAFTAR DAN LAMPIRAN

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212021
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Perjalanan Dinas

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	524111	Beban Perjalanan Dinas	5.447.408	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		5.447.408

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212022
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Belanja Bahan

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521211	Beban Perjalanan Dinas	30.000	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		30.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212010
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Koreksi atas transaksi tercatat sebagai koreksi lain -Ekuitas menjadi beban penyesihan

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrua

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	38.489.485.359	
	K	391119	Koreksi Lainnya		38.489.485.359

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212011
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas atas konsep temuan BPK TA 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrua

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	327.840	
	K	524111	Beban Perjalanan Biasa		327.840

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212012
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Pengembalian Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai dengan Konsep Temuan BPK TA 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrua

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	1.736.477	
	K	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.736.477

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212013
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Ketidaktepatan Penginputan Saldo Piutang Baru Ke Saldo Awal an Junika Pentarosa

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrua

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	25.000.000	
	K	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian		25.000.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212014
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrua

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	12.414.310	
	K	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang		12.414.310

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212015
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNBP

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrua

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	1.005.804.331	
	K	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNBP		1.005.804.331

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212016
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Lainnya

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrua

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.322	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		10.322

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212010
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Deposit Apartemen yg belum dikembalikan
karena belum ada keputusan adanya kerusakan yang ditanggung
oleh KPPU

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	85.956.473	
	K	522141	Belanja Sewa		85.956.473

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212011
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Listrik Des 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	117.220.420	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		117.220.420

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212012
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Telepon Des 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	19.428.858	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		19.428.858

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212013
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Penambah Daya Tahan Tubuh

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	409.753	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		409.753

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212014
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Pos dan Pengiriman Des 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Beban Langganan Pos	18.657.760	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		18.657.760

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212015
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Zoom Des 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.559.708	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		1.559.708

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212016
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		150.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212017
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Keperluan Kantor

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521111	Beban Keperluan Kantor	660.000	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		660.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212018
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Air Des 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Beban Langganan Air	5.083.453	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		5.083.453

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212019
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi
 Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.500.000	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		60.500.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP202212022
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Akrual Belanja Bahan

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521211	Beban Perjalanan Dinas	30.000	
	K	115212	Belanja Barang YMHD		30.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita

Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU202212011
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Ketidaktepatan Penginputan Saldo Piutang Baru Ke Saldo Awal
an Junika Pentarosa

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	25.000.000	
	K	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		25.000.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU202212013
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Pengakuan pembayaran piutang Tahun sebelumnya yang Inkracht pada Tahun ini

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219212	Pendapatan Diterima Dimuka	300.000.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		300.000.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU202212014
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang TGR

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	6.936.079	
	K	156311	Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang TGR		6.936.079

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU202212015
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNB

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNB	14.855.860.546	
	K	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB		14.855.860.546

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU202212010
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Jaminan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219212	Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	540.000.000	
	K	164211	Dana Pihak Ketiga		540.000.000

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU202212011
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Penyisihan Piutang tidak tertagih

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Penyisihan Piutang Lainnya	457.169	
	K	116212	Piutang Lainnya		457.169

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU202212012
Tanggal : 31 Desember 2022
Tahun Anggaran : 2022
Keterangan : Penyisihan Piutang tidak tertagih

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Piutang Lainnya	374.449	
	K	391119	Koreksi Lainnya		374.449

Tanggal: 31 Desember 2022
Dibuat Oleh: Irena Yusnita



Tanggal: 31 Desember 2022
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2022
Direkam oleh: Irena Yusnita



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:39 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	76,236,865,178	103,184,921,477	(26,948,056,299)	(26.116)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	76,236,865,178	103,184,921,477	(26,948,056,299)	(26.116)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	76,236,865,178	103,184,921,477	(26,948,056,299)	(26.116)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	43,669,431,637	42,452,322,044	1,217,109,593	2.867
Beban Persediaan	3,218,536,781	2,818,351,747	400,185,034	14.199
Beban Barang dan Jasa	35,976,892,691	35,908,064,343	68,828,348	0.192
Beban Pemeliharaan	4,613,838,674	4,043,363,185	570,475,489	14.109
Beban Perjalanan Dinas	41,805,145,139	38,683,442,696	3,121,702,443	8.07
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:39 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4,839,444,681	4,350,724,234	488,720,447	11.233
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(26,849,352,956)	(60,015,065,237)	33,165,712,281	(55.262)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	107,273,936,647	68,241,203,012	39,032,733,635	57.198
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(31,037,071,469)	34,943,718,465	(65,980,789,934)	(188.82)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	357,067,814	(2,116,099,397)	2,473,167,211	(116.874)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	414,679,009	43,000,999	371,678,010	864.347
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	57,611,195	2,159,100,396	(2,101,489,201)	(97.332)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	92,881,000	74,962,325	17,918,675	23.904
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	92,881,000	74,962,325	17,918,675	23.904
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	449,948,814	(2,041,137,072)	2,491,085,886	(122.044)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(30,587,122,655)	32,902,581,393	(63,489,704,048)	(192.963)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(30,587,122,655)	32,902,581,393	(63,489,704,048)	(192.963)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:22 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	60,751,965,550	40,187,234,206	20,564,731,344	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(30,587,122,655)	32,902,581,393	(63,489,704,048)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	283,444,506	(28,489,030)	311,933,536	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	283,444,506	(28,489,030)	311,933,536	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,423,171,221	(12,309,361,019)	30,732,532,240	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(11,880,506,928)	20,564,731,344	(32,445,238,272)	-
EKUITAS AKHIR	48,871,458,622	60,751,965,550	(11,880,506,928)	-

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 108
ESELON I : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 01
SATUAN KERJA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 422810

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM
 Tgl Cetak : 11/05/23 3:41 PM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	135,642,665,000	133,962,379,002	1,680,285,998	99	141,290,622,000	136,467,729,454	4,822,892,546	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:43 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	333,759,026,398	368,465,260,494	(34,706,234,096)	(9.42)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(298,201,774,915)	(324,924,057,949)	26,722,283,034	(8.22)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	35,557,251,483	43,541,202,545	(7,983,951,062)	(18.34)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	543,000,969	712,772,372	(169,771,403)	(23.82)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(400,715,969)	(528,160,340)	127,444,371	(24.13)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	142,285,000	184,612,032	(42,327,032)	(22.93)
Persediaan	572,734,467	640,534,960	(67,800,493)	(10.58)
JUMLAH ASET LANCAR	36,272,270,950	44,366,349,537	(8,094,078,587)	(18.24)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	39,100,993,304	38,974,285,799	126,707,505	0.33
Aset Tetap Lainnya	3,531,167,562	5,583,219,402	(2,052,051,840)	(36.75)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27,467,670,163)	(25,544,532,955)	(1,923,137,208)	7.53
JUMLAH ASET TETAP	15,164,490,703	19,012,972,246	(3,848,481,543)	(20.24)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,859,577,964	1,814,577,964	45,000,000	2.48
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	0	200,000,000	(200,000,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,336,675,527)	(1,095,641,751)	(241,033,776)	22.00
JUMLAH ASET LAINNYA	522,902,437	918,936,213	(396,033,776)	(43.10)
JUMLAH ASET	51,959,664,090	64,298,257,996	(12,338,593,906)	(19.19)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	238,312,472	396,399,450	(158,086,978)	(39.88)
Pendapatan Diterima Dimuka	2,849,892,996	3,149,892,996	(300,000,000)	(9.52)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,088,205,468	3,546,292,446	(458,086,978)	(12.92)
JUMLAH KEWAJIBAN	3,088,205,468	3,546,292,446	(458,086,978)	(12.92)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	48,871,458,622	60,751,965,550	(11,880,506,928)	(19.56)
JUMLAH EKUITAS	48,871,458,622	60,751,965,550	(11,880,506,928)	(19.56)
JUMLAH EKUITAS	48,871,458,622	60,751,965,550	(11,880,506,928)	(19.56)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51,959,664,090	64,298,257,996	(12,338,593,906)	(19.19)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:43 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:45 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	333,665,528,200	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	93,498,198	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	543,000,969	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	298,201,307,424
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	467,491
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	400,715,969
0.0	117111	Barang Konsumsi	553,327,347	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	18,372,120	0
0.0	117131	Bahan Baku	1,035,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	39,100,993,304	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	1,853,917,814	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,677,249,748	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	27,404,420,163
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	63,250,000
0.0	162151	Software	1,859,577,964	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,336,675,527
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	227,812,472
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	10,500,000
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	2,849,892,996
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	133,962,379,002
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	111,694,117,941	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,845,089,840	0
0.0	391111	Ekuitas	0	60,751,965,550
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	283,444,506
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	414,679,009
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	2,824,600
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	75,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	79,698,750
3.0	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	0	73,628,254,880
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	2,521,562,948
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,524,000
3.0	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	2,881,000
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	43,614,739,637	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	54,692,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,301,926,554	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	173,304,410	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:45 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	388,662,482	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	384,485,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	379,617,150	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,043,951,734	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,067,283,798	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,309,680,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	150,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	32,190,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,325,769,820	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	811,276,274	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	77,739,586	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70,829,702	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,951,063,550	0
3.0	522141	Beban Sewa	8,315,825,717	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,351,553,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	12,783,228,818	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	208,355,096	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,364,591,400	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	84,777,324	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,978,120,589	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	29,691,009,108	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	509,600,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82,493,450	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,488,801,582	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	33,240,999	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,543,067,155	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	55,343,750	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	241,033,776	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,216,811,781	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	186,349,361	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,725,000	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	26,722,376,076
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	467,491	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	127,444,371
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	57,611,195	0
JUMLAH			629,087,076,734	629,087,076,734

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:46 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,301,266,554	0
3.0	522141	Belanja Sewa	8,397,653,170	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,042,393,166	0
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	252,841,460
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	509,600,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,067,313,798	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,337,085,649	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,713,957
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	414,679,009
3.0	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	0	110,736,820,422
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	43,624,581,650	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,353,848,000	0
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	2,824,600
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	112,840,000
3.1	521131	Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,140
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	172,894,657	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	12,780,347,818	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,843,675,500	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,295,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	113,431,221
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	84,777,324	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	208,355,096	0
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	79,698,750
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	29,810,215,577	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82,493,450	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	384,485,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	379,617,150	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,309,680,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	86,832,200	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,951,063,550	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	89,889,700
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	150,000	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	34,013,564	0
3.1	512111	Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap	0	9,842,013
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	133,962,379,002
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	799,471,601	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	73,090,818	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl Data : 11/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 11/05/23 3:46 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,366,177,877	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,917,620,589	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,524,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,491,515,539	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,853,954,897	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	54,692,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	425,760,684	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,314,618,020	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	772,565
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	32,190,000	0
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	111,694,117,941	0
JUMLAH			245,785,552,839	245,785,552,839

Keterangan :

FINAL

LAPORAN KEUANGAN

TA 2022
AUDITED

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
5194	Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan	Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan	2.356.975.000	2.355.038.381				
		(PEB) Forum	491.100.000	490.669.301	PEB	5	5	Forum
			91.100.000	90.871.542	PEB.001	3	3	Forum
			400.000.000	399.797.759	PEB.002	2	2	Forum
		(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	752.180.000	751.279.178	QDB	13	13	Lembaga
			101.076.000	100.898.428	QDB.001	2	2	Lembaga
			651.104.000	650.380.750	QDB.002	11	11	Lembaga
		(QDH) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1.113.695.000	1.113.089.902	QDH	9	9	Badan Usaha
			806.581.000	806.026.630	QDH.001	7	7	Badan Usaha
			307.114.000	307.063.272	QDH.002	2	2	Badan Usaha
3953	Direktorat Pengawasan Kemitraan	Pengawasan Kemitraan	2.345.600.000	2.340.403.871				
		(QCE) Penanganan Perkara	2.345.600.000	2.340.403.871	QCE	15	19	Perkara
			1.129.523.000	1.125.328.921	QCE.001	8	8	Perkara
			150.200.000	150.098.457	QCE.002	1	1	Perkara
			1.013.100.000	1.012.606.567	QCE.003	5	8	Perkara
52.777.000	52.369.926	QCE.004	1	2	Perkara			
3958	Direktorat Merger	Penilaian Merger dan Akuisisi	2.387.199.000	2.368.354.884				

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
		(QCD) Perkara Hukum Badan Usaha	596.355.000	595.141.160	QCD	5	10	Perkara
			596.355.000	595.141.160	QCD.002	5	10	Perkara
		(QIH) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1.649.744.000	1.635.375.609	QIH	24	531	Badan Usaha
			950.514.000	938.914.691	QIH.001	15	320	Badan Usaha
			699.230.000	696.460.918	QIH.002	9	211	Badan Usaha
		(RAH) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	141.100.000	137.838.115	RAH	1	1	Unit
			141.100.000	137.838.115	RAH.001	1	1	Unit
3956	Direktorat Investigasi	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	3.532.739.000	3.512.566.892				
			3.532.739.000	3.512.566.892	QCE	38	102	Perkara
		(QCE) Penanganan perkara	1.550.039.000	1.549.164.893	QCE.001	22	86	Perkara
			786.000.000	782.554.879	QCE.002	7	7	Perkara
			1.146.200.000	1.136.291.120	QCE.003	7	7	Perkara
			50.500.000	44.556.000	QCE.004	2	2	Perkara
3957	Direktorat Penindakan	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	2.663.563.000	2.659.290.526				

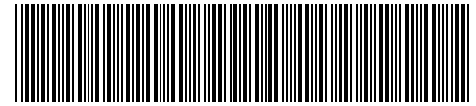
Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
			2.663.563.000	2.659.290.526	QCE	20	34	Perkara
		(QCE) Penanganan Perkara	488.735.000	486.645.244	QCE.001	4	11	Perkara (Pemberkasan)
			1.478.994.000	1.477.730.911	QCE.002	10	15	Perkara (Penuntutan)
			695.834.000	694.914.371	QCE.003	6	8	Perkara (Litigasi)
5275	Kepaniteraan	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	9.836.462.000	9.423.816.590				
			9.836.462.000	9.423.816.590	QCE	33	39	Perkara
		(QCE) Penanganan Perkara	2.442.214.000	2.369.198.720	QCE.001	11	12	Perkara
			6.261.046.000	5.988.696.528	QCE.002	13	12	Perkara
			1.133.202.000	1.065.921.342	QCE.003	9	15	Perkara
3955	Kantor Wilayah	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	6.899.600.000	6.809.551.878				
			2.037.630.000	2.017.435.436	PBB	15	21	Rekomendasi Kebijakan
		(PBB) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	262.990.000	259.050.670	PBB.001	2	2	Rekomendasi Kebijakan
			109.078.000	108.826.541	PBB.002	1	3	Rekomendasi Kebijakan

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO)		
						Target	Realisasi	
			170.465.000	169.032.376	PBB.003	2	4	Rekomendasi Kebijakan
			262.990.000	262.828.365	PBB.004	2	2	Rekomendasi Kebijakan
			447.349.000	439.829.327	PBB.005	3	3	Rekomendasi Kebijakan
			589.758.000	583.907.401	PBB.006	3	5	Rekomendasi Kebijakan
			195.000.000	193.960.756	PBB.007	2	2	Rekomendasi Kebijakan
			1.871.889.000	1.827.974.745	QCE	14	17	Perkara
		(QCE) Penanganan Perkara	562.635.000	543.059.485	QCE.001	3	3	Perkara
			371.207.000	361.822.685	QCE.002	3	3	Perkara
			159.299.000	157.449.999	QCE.003	2	2	Perkara
			92.635.000	92.580.992	QCE.004	1	1	Perkara
			153.720.000	142.855.305	QCE.005	1	2	Perkara
			252.515.000	250.547.870	QCE.006	2	4	Perkara
			279.878.000	279.658.409	QCE.007	2	2	Perkara
		(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.990.081.000	2.964.141.697	UBA	35		Prov/Kab/Kota
			285.578.000	279.177.331	UBA.001	3	3	Prov/Kab/Kota
			305.575.000	305.153.178	UBA.002	5	5	Prov/Kab/Kota
			537.469.000	533.390.487	UBA.003	6	6	Prov/Kab/Kota

Kode	Unit Kerja	Kegiatan/KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kode KRO/ RO	Output		Satuan
						(KRO)/RO		
						Target	Realisasi	
			589.843.000	589.260.860	UBA.004	6	6	Prov/Kab/Kota
			545.817.000	539.708.905	UBA.005	7	9	Prov/Kab/Kota
			474.372.000	466.428.564	UBA.006	5	8	Prov/Kab/Kota
			251.427.000	251.022.372	UBA.007	3	3	Prov/Kab/Kota
TOTAL			34.778.671.000	34.092.838.578				



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 108.01.1.422810/2022**



DS:5594-6618-5361-1006

Revisi ke 17

Tanggal : 27 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (108) | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | Komisi Pengawas Persaingan Usaha |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (422810) | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA |
| Sebesar | : Rp. | 135.642.665.000 (SERATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	88.718.842.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	46.923.823.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA VI | (175) Rp. | 135.642.665.000 |
|--------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022

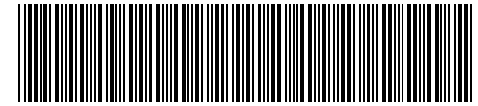


DS:5594-6618-5361-1006

Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	Rp.	34.778.671.000
EG.3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	Rp.	2.977.964.000
EG.3953	Pengawasan Kemitraan	Rp.	2.345.600.000
EG.3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	Rp.	6.899.600.000
EG.3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Rp.	3.532.739.000
EG.3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	Rp.	2.663.563.000
EG.3958	Penilaian Merger dan Akuisisi	Rp.	2.387.199.000
EG.5162	Analisis Kebijakan Pemerintah	Rp.	1.778.569.000
EG.5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	Rp.	2.356.975.000
EG.5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	Rp.	9.836.462.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	100.863.994.000
WA.5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	Rp.	86.284.031.000
WA.5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	4.583.766.000
WA.5973	Peningkatan Data dan Informasi	Rp.	1.315.519.000
WA.5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	Rp.	2.663.260.000
WA.5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	Rp.	2.413.920.000
WA.5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	Rp.	511.328.000
WA.5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	Rp.	3.092.170.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 1

Program	:	108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha				34.778.671.000
Kegiatan	:	3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha				2.977.964.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase kajian sektor prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024				
		2. 02	Persentase kajian ekonomi menjadi penelitian inisiatif tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha				
		3. 03	Indeks persaingan usaha				
		4. 04	Jumlah pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3952.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		10,00	Rekomendasi Kebijakan	2.977.964.000
Rincian Output	:	01	PBB.001 Penelitian Pengawasan Persaingan Usaha (PN)		6,00	Rekomendasi Kebijakan	1.708.289.000
		02	PBB.002 Indeks Persepsi Persaingan Usaha (PN)		3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.059.675.000
		03	PBB.003 Pengelolaan dan Pengembangan Basis Data (PN)		1,00	Rekomendasi Kebijakan	210.000.000
Kegiatan	:	3953	Pengawasan Kemitraan				2.345.600.000
	:	1. 01	Persentase penilaian perjanjian kemitraan yang sehat yang diselesaikan				
		2. 02	Persentase penanganan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan				
		3. 03	Persentase monitoring pelaksanaan surat peringatan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3953.QCE	Penanganan Perkara		15,00	Perkara	2.345.600.000
Rincian Output	:	01	QCE.001 Hasil Klarifikasi Pengawasan Kemitraan (PN)		8,00	Perkara	1.129.523.000
		02	QCE.002 Hasil Penelitian Inisiatif Pengawasan Kemitraan (PN)		1,00	Perkara	150.200.000
		03	QCE.003 Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan (PN)		5,00	Perkara	1.013.100.000
		04	QCE.004 Hasil Monitoring Peringatan Tertulis Pengawasan Kemitraan (PN)		1,00	Perkara	52.777.000
Kegiatan	:	3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU				6.899.600.000
	:	1. 01	Persentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil				
		2. 02	Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Thp Pemeriksaan Pendahuluan				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 2

Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU

- | | |
|-------|---|
| 02 | Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Thp Pemeriksaan Pendahuluan |
| 3. 03 | Persentase harmonisasi peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kanwil |
| 4. 04 | Persentase advokasi persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan |
| 5. 05 | Persentase koordinasi dan implementasi MoU yang diselesaikan |
| 6. 06 | Persentase pelaksanaan forum jurnalis yang diselesaikan |
| 7. 07 | Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang diselesaikan |
| 8. 08 | Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan |

Klasifikasi Rincian Output	3	:	3955.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		15,00	Rekomendasi Kebijakan	2.037.630.000	
Rincian Output	:								
			01	PBB.001	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah I Medan	(PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	262.990.000
			02	PBB.002	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah II Lampung	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	109.078.000
			03	PBB.003	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah III Bandung	(PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	170.465.000
			04	PBB.004	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya	(PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	262.990.000
			05	PBB.005	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah V Balikpapan	(PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	447.349.000
			06	PBB.006	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar	(PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	589.758.000
			07	PBB.007	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta	(PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	195.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3955.QCE	Penanganan Perkara			14,00	Perkara	1.871.889.000
Rincian Output	:								
			01	QCE.001	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah I Medan	(PN)	3,00	Perkara	562.635.000
			02	QCE.002	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah II Lampung	(PN)	3,00	Perkara	371.207.000
			03	QCE.003	Hasil Klarifikasi Laporan Pelanggaran Pesaingan Usaha di Kantor Wilayah III Bandung	(PN)	2,00	Perkara	159.299.000
			04	QCE.004	Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya	(PN)	1,00	Perkara	92.635.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 3

Penanganan Perkara				Perkara			
	05	QCE.005	Hasil Klarifikasi Laporan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah V Balikpapan	(PN)	1.00	Perkara	153.720.000
	06	QCE.006	Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar	(PN)	2.00	Perkara	252.515.000
	07	QCE.007	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta	(PN)	2.00	Perkara	279.878.000
Klasifikasi Rincian Output	5	3955.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		35,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.990.081.000
Rincian Output	01	UBA.001	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil I Medan	(PN)	3.00	Prov/Kab/Kota	285.578.000
	02	UBA.002	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil II Lampung	(PN)	5.00	Prov/Kab/Kota	305.575.000
	03	UBA.003	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/kota di Kanwil III Bandung	(PN)	6.00	Prov/Kab/Kota	537.469.000
	04	UBA.004	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil IV Surabaya	(PN)	6.00	Prov/Kab/Kota	589.843.000
	05	UBA.005	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil V Balikpapan	(PN)	7.00	Prov/Kab/Kota	545.817.000
	06	UBA.006	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VI Makassar	(PN)	5.00	Prov/Kab/Kota	474.372.000
	07	UBA.007	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VII Yogyakarta	(PN)	3.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	251.427.000
Kegiatan	:	3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat				3.532.739.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase laporan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan				
		2. 02	Persentase hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan				
		3. 03	Persentase hasil laporan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	6	:	3956.QCE	Penanganan Perkara		38,00	Perkara	3.532.739.000	
Rincian Output		:	01	QCE.001	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha yang terselesaikan	(PN)	22,00	Perkara	1.550.039.000
		:	02	QCE.002	Hasil Penelitian Perkara Inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha yang terselesaikan	(PN)	7,00	Perkara	786.000.000
		:	03	QCE.003	Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang terselesaikan	(PN)	7,00	Perkara	1.146.200.000
		:	04	QCE.004	Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha	(PN)	2,00	Perkara	50.500.000
Kegiatan		:	3957		Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat				2.663.563.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01	Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha				
		:	2.	02	Persentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan/sidang majelis komisi				
		:	3.	03	Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan				
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3957.QCE	Penanganan Perkara		20,00	Perkara	2.663.563.000	
Rincian Output		:	01	QCE.001	Hasil Pemberkasan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	(PN)	4,00	Perkara	488.735.000
		:	02	QCE.002	Hasil Penuntutan terhadap Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi	(PN)	10,00	Perkara	1.478.994.000
		:	03	QCE.003	Hasil Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU	(PN)	6,00	Perkara	695.834.000
Kegiatan		:	3958		Penilaian Merger dan Akuisisi				2.387.199.000
		:	1.	01	Persentase notifikasi merger dan akuisisi yang ditindaklanjuti ke tahap penilaian				
		:	2.	02	Persentase penilaian merger dan akuisisi yang diselesaikan				
		:	3.	03	Persentase perkara merger dan akuisisi yang diselesaikan				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	8	:	3958.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha		5,00	Perkara	596.355.000
Rincian Output		:	01	QCD.002 Hasil Penyelidikan Dugaan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi	(PN)	5,00	Perkara	596.355.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	3958.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		24,00	Badan Usaha	1.649.744.000
Rincian Output		:	01	QIH.001 Hasil Klarifikasi dan Penelitian Notifikasi Merger dan Akuisisi	(PN)	15,00	Badan Usaha	950.514.000
Rincian Output		:	02	QIH.002 Penetapan Notifikasi yang Memuat Pendapat KPPU atas Hasil Penilaian Merger dan Akuisisi	(PN)	9,00	Badan Usaha	699.230.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	3958.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		1,00	Unit	141.100.000
Rincian Output		:	01	RAH.001 Sistem Analisa Merger dan Akuisisi	(PN)	1,00	Unit	141.100.000
Kegiatan		:	5162	Analisis Kebijakan Pemerintah				1.778.569.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase pemerintah pusat (K/L) dan Pemerintah Provinsi yang menggunakan asesmen kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti sebagai referensi dalam proses				
		:	2. 02	Persentase kajian kebijakan persaingan usaha yang menjadi surat saran pertimbangan				
		:	3. 03	Persentase harmonisasi/koordinasi kebijakan persaingan usaha yang ditindaklanjuti				
		:	4. 04	Persentase surat saran pertimbangan yang ditindaklanjuti				
Klasifikasi Rincian Output	11	:	5162.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		9,00	Rekomendasi Kebijakan	1.678.569.000
Rincian Output		:	01	PBB.001 Kajian Kebijakan Pemerintah Pada Kementerian / Lembaga	(PN)	5,00	Rekomendasi Kebijakan	1.150.363.000
Rincian Output		:	02	PBB.002 Surat Saran Hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah terkait Persaingan Usaha	(PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	293.166.000
Rincian Output		:	03	PBB.003 Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Persaingan Usaha	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	235.040.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	12	:	5162.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1,00	Sistem Informasi	100.000.000	
Rincian Output		:	01	UAB.001	Sistem Aplikasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) berbasis Web	(PN)	1,00	Sistem Informasi	100.000.000
Kegiatan		:	5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan				2.356.975.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase pemahaman stakeholder tentang prinsip persaingan usaha yang sehat					
		:	2. 02	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha (competition compliance)					
		:	3. 03	Jumlah K/L/Pemprov/Perguruan Tinggi yang telah memperoleh sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat					
		:	4. 04	Jumlah kegiatan sosialisasi kepada Pelaku Usaha, Pelaku UMKM terkait pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan yang sehat					
		:	5. 05	Persentase Modul Advokasi yang ditetapkan menjadi bahan advokasi					
Klasifikasi Rincian Output	13	:	5194.PEB	Forum		5,00	forum	491.100.000	
Rincian Output		:	01	PEB.001	Forum Instrumen Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	(PN)	3,00	Forum	91.100.000
		:	02	PEB.002	Instrument Implementasi Program Kepatuhan Persaingan Usaha	(PN)	2,00	forum	400.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	5194.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		13,00	Lembaga	752.180.000	
Rincian Output		:	01	QDB.001	Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga	(PN)	2,00	Lembaga	101.076.000
		:	02	QDB.002	Advokasi Kemitraan ke Lembaga	(PN)	11,00	Advokasi	651.104.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	5194.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		9,00	Badan usaha	1.113.695.000	
Rincian Output		:	01	QDH.001	Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha	(PN)	7,00	Advokasi	806.581.000
		:	02	QDH.002	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	(PN)	2,00	Badan Usaha	307.114.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



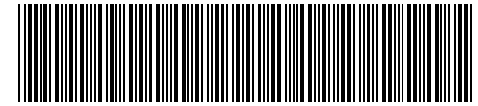
DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 7

Kegiatan	:	5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha				9.836.462.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelaksanaan Sidang Majelis Komisi yang terlaksana				
		2. 02	Persentase Putusan KPPU yang diselesaikan				
		3. 03	Jumlah hasil Reviu Putusan KPPU terhadap iklim usaha dan investasi				
Klasifikasi Rincian Output 16	:	5275.QCE	Penanganan Perkara	33,00	Perkara		9.836.462.000
Rincian Output	:	01	QCE.001 Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha (PN)	11,00	Perkara		2.442.214.000
		02	QCE.002 Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha (PN)	13,00	Perkara		6.261.046.000
		03	QCE.003 Putusan Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha (PN)	9,00	Perkara		1.133.202.000
Program	:	108.01.WA	Program Dukungan Manajemen				100.863.994.000
Kegiatan	:	5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum				86.284.031.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan pengguna layanan Sumber Daya Manusia (skala 1-7)				
		2. 01	Indeks kepuasan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat dan Daerah (skala 1-7)				
		3. 01	Indeks layanan ketatausahaan dan keprotokolan (skala 1-7)				
		4. 01	Indeks layanan umum operasional teknis internal (skala 1-7)				
		5. 01	Persentase utilisasi aset K/L				
		6. 02	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN (skala 1-7)				
		7. 02	Persentase pegawai yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency				
		8. 03	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan				
		9. 04	Jumlah kebijakan perencanaan SDM				
		10. 05	Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia (skala 1-7)				
		11. 06	Persentase Penilaian Kinerja pegawai dengan nilai minimal BAIK				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 8

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5971.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan	74.970.027.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	1.080.094.000
		:	02	EBA.959 Layanan Protokoler	1,00	Layanan	1.831.056.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	986.996.000
		:	04	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	603.984.000
		:	05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	70.467.897.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5971.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	232,00	Unit	4.659.872.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	231,00	Unit	2.871.022.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	1.788.850.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5971.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	417,00	Orang	6.141.081.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	417,00	Orang	6.141.081.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	5971.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24,00	Dokumen	513.051.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	171.579.000
		:	02	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	23,00	Dokumen	341.472.000
Kegiatan		:	5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			4.583.766.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase lulusan diklat berbasis kompetensi dengan nilai minimal baik			
		:	2. 02	Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran (skala 1-7)			
		:	3. 03	Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat berbasis kompetensi			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



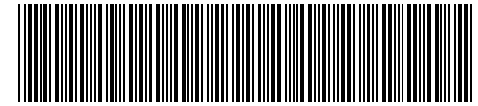
DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 9

Klasifikasi Rincian Output	5	:	5972.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	26,00	Lembaga	1.767.540.000	
Rincian Output		:	01	BDB.001	Pembinaan dan Koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait Penyiapan Instrumen Pelatihan dengan Aparat Penegakan Hukum Persaingan Usaha	4,00	Lembaga	166.100.000
		:	02	BDB.002	Pembinaan dan Koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara terkait Penyiapan Instrumen Pelatihan Kebijakan Persaingan Usaha bagi Aparatur/Kementrian/Lembaga	22,00	Lembaga	1.601.440.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	5972.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	690,00	Orang	2.739.310.000	
Rincian Output		:	01	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	690,00	Orang	2.739.310.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	5972.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Dokumen	76.916.000	
Rincian Output		:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,00	Dokumen	76.916.000
Kegiatan		:	5973	Peningkatan Data dan Informasi			1.315.519.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (skala 1-5)				
		:	2. 02	Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)				
Klasifikasi Rincian Output	8	:	5973.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan	1.315.519.000	
Rincian Output		:	01	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	1.315.519.000
Kegiatan		:	5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi			2.663.260.000	
		:	1. 01	Persentase keberhasilan pendampingan hukum				
		:	2. 01	Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan				
		:	3. 01	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran denda persaingan usaha				
		:	4. 02	Jumlah verifikasi atas produk hukum				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

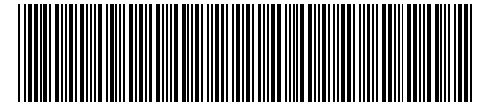
Halaman : I A. 10

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi

- 5. 02 Persentase Target pelaksanaan Eksekusi kepada terlapor di tahun berjalan
- 6. 03 Jumlah upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait
- 7. 04 Persentase layanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara

Klasifikasi Rincian Output	9	:	5974.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan	2.592.036.000
Rincian Output		:	01 EBA.002	Layanan Pelaksanaan Eksekusi	1,00	Layanan	1.295.648.000
		:	02 EBA.957	Layanan Hukum	2,00	Layanan	1.270.000.000
		:	03 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1,00	Layanan	26.388.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	5974.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen	71.224.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,00	Dokumen	71.224.000
Kegiatan		:	5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga			2.413.920.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik (skala 1-7)			
		:	2. 01	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional (skala 1-7)			
		:	3. 01	Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media			
		:	4. 02	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)			
		:	5. 02	Persentase peningkatan kontribusi lembaga di tingkat internasional			
		:	6. 03	Persentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik			
		:	7. 03	Persentase peningkatan komunikasi dan diseminasi praktek terbaik internasional bagi lembaga			
Klasifikasi Rincian Output	11	:	5975.AEB	Forum	3,00	forum	432.862.000
Rincian Output		:	01 AEB.001	Forum pemenuhan target cetak biru ASEAN Bidang Persaingan Usaha Tahun 2021	1,00	Forum	108.774.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



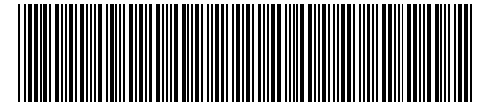
DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 11

	Forum				forum		
	02	AEB.002	Forum Pemanfaatan keanggotaan KPPU di Komite Persaingan Usaha OECD	2,00	Forum	324.088.000	
Klasifikasi Rincian Output	12	: 5975.AEC	Kerja sama	8,00	Kesepakatan	345.028.000	
Rincian Output	: 01	AEC.001	Kerja Sama antara KPPU dengan Lembaga Pemerintah/Perguruan Tinggi	8,00	Kesepakatan	345.028.000	
Klasifikasi Rincian Output	13	: 5975.AED	Perjanjian	2,00	perjanjian	75.408.000	
Rincian Output	: 01	AED.001	Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia - Uni Eropa bidang Persaingan Usaha	2,00	Perjanjian	75.408.000	
Klasifikasi Rincian Output	14	: 5975.BMA	Data dan Informasi Publik	2,00	layanan	516.854.000	
Rincian Output	: 01	BMA.001	Layanan Pengelolaan Perpustakaan dan Jurnal Persaingan Usaha	1,00	layanan	269.694.000	
		02	BMA.002	Layanan PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) di KPPU	1,00	layanan	247.160.000
Klasifikasi Rincian Output	15	: 5975.BMB	Komunikasi Publik	1,00	layanan	178.947.000	
Rincian Output	: 01	BMB.001	Pelaksanaan Strategi Komunikasi dan Layanan edukasi publik	1,00	layanan	178.947.000	
Klasifikasi Rincian Output	16	: 5975.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan	732.159.000	
Rincian Output	: 01	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	732.159.000	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 12

Klasifikasi Rincian Output	17	:	5975.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen	132.662.000
Rincian Output		:	01 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	132.662.000
Kegiatan		:	5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU			511.328.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase jumlah rekomendasi atas hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti			
			2. 02	Nilai hasil telaah sejawat			
			3. 03	Nilai internal Audit Capability Model			
Klasifikasi Rincian Output	18	:	5976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8,00	Dokumen	511.328.000
Rincian Output		:	01 EBD.001	Layanan Non Audit Internal	6,00	Dokumen	421.480.000
			02 EBD.965	Layanan Audit Internal	2,00	Dokumen	89.848.000
Kegiatan		:	5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU			3.092.170.000
		:	1. 01	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan pada tahun berjalan			
			2. 01	Jumlah laporan keuangan (Tahunan dan Semester)			
			3. 01	Nilai laporan akuntabilitas kinerja kelembagaan KPPU			
			4. 02	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L			
			5. 02	Opini BPK atas laporan keuangan			
Klasifikasi Rincian Output	19	:	5977.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24,00	Dokumen	3.092.170.000
Rincian Output		:	01 EBD.001	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan	3,00	Dokumen	139.488.000
			02 EBD.002	Layanan Penyelarasan Kegiatan dan Revisi Anggaran	1,00	Layanan	146.076.000
			03 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6,00	Layanan	545.231.000
			04 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9,00	Dokumen	934.308.000
			05 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	5,00	Dokumen	1.327.067.000

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 13

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dokumen

Jakarta, 17 November 2021
Wakil Ketua KPPU

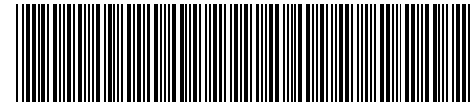
ttd.
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M
NIP -

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022

I B. SUMBER DANA



DS:5594-6618-5361-1006

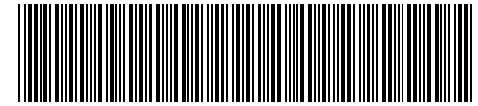
Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
 Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

				Pagu			Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	135.642.665.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	88.718.842.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	46.923.823.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
422810	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	44.120.992	86.821.801	4.699.872	-	-	135.642.665		
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	-	34.778.671	-	-	-	34.778.671		
3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	-	2.977.964	-	-	-	2.977.964		
3952.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.977.964	-	-	-	2.977.964	01 . 51	
01	RM	-	968.289	-	-	-	968.289	175	
04	PNBP	-	2.009.675	-	-	-	2.009.675	175	
3953	Pengawasan Kemitraan	-	2.345.600	-	-	-	2.345.600		
3953.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.345.600	-	-	-	2.345.600	01 . 51	
01	RM	-	870.677	-	-	-	870.677	175	
04	PNBP	-	1.474.923	-	-	-	1.474.923	175	
3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	-	6.899.600	-	-	-	6.899.600		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3955.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.037.630	-	-	-	2.037.630	01 . 51	
01	RM	-	855.823	-	-	-	855.823	175	
04	PNBP	-	1.181.807	-	-	-	1.181.807	175	
3955.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.871.889	-	-	-	1.871.889	01 . 51	
01	RM	-	727.747	-	-	-	727.747	175	
04	PNBP	-	1.144.142	-	-	-	1.144.142	175	
3955.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.990.081	-	-	-	2.990.081	01 . 51	
01	RM	-	416.957	-	-	-	416.957	175	
04	PNBP	-	2.573.124	-	-	-	2.573.124	175	
3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	-	3.532.739	-	-	-	3.532.739		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3956.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.532.739	-	-	-	3.532.739	01 . 51	
01	RM	-	1.153.500	-	-	-	1.153.500	175	
04	PNBP	-	2.379.239	-	-	-	2.379.239	175	
3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	-	2.663.563	-	-	-	2.663.563		
3957.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.663.563	-	-	-	2.663.563	01 . 51	
01	RM	-	489.569	-	-	-	489.569	175	
04	PNBP	-	2.173.994	-	-	-	2.173.994	175	
3958	Penilaian Merger dan Akusisi	-	2.387.199	-	-	-	2.387.199		
3958.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	596.355	-	-	-	596.355	01 . 51	
01	RM	-	121.355	-	-	-	121.355	175	
04	PNBP	-	475.000	-	-	-	475.000	175	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3958.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.649.744	-	-	-	1.649.744	01 . 51	
01	RM	-	207.686	-	-	-	207.686	175	
04	PNBP	-	1.442.058	-	-	-	1.442.058	175	
3958.RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	141.100	-	-	-	141.100	01 . 51	
01	RM	-	81.100	-	-	-	81.100	175	
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000	175	
5162	Analisis Kebijakan Pemerintah	-	1.778.569	-	-	-	1.778.569		
5162.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.678.569	-	-	-	1.678.569	01 . 51	
01	RM	-	398.569	-	-	-	398.569	175	
04	PNBP	-	1.280.000	-	-	-	1.280.000	175	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5162.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	100.000	-	-	-	100.000	01 . 51	
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	175	
04	PNBP	-	50.000	-	-	-	50.000	175	
5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	-	2.356.975	-	-	-	2.356.975		
5194.PEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	491.100	-	-	-	491.100	01 . 51	
04	PNBP	-	491.100	-	-	-	491.100	175	
5194.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	752.180	-	-	-	752.180	01 . 51	
01	RM	-	103.194	-	-	-	103.194	175	
04	PNBP	-	648.986	-	-	-	648.986	175	
5194.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.113.695	-	-	-	1.113.695	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	256.581	-	-	-	256.581	175	
04 PNB		-	857.114	-	-	-	857.114	175	
5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	-	9.836.462	-	-	-	9.836.462		
5275.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.836.462	-	-	-	9.836.462	01 . 51	
01 RM		-	2.174.979	-	-	-	2.174.979	175	
04 PNB		-	7.661.483	-	-	-	7.661.483	175	
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen	44.120.992	52.043.130	4.699.872	-	-	100.863.994		
5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	44.120.992	37.503.167	4.659.872	-	-	86.284.031		
5971.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	44.120.992	30.849.035	-	-	-	74.970.027	01 . 51	
01 RM		44.120.992	28.067.242	-	-	-	72.188.234	175	
04 PNB		-	2.781.793	-	-	-	2.781.793	175	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5971.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	4.659.872	-	-	4.659.872	01 . 51	
01	RM	-	-	36.627	-	-	36.627	175	
04	PNBP	-	-	4.623.245	-	-	4.623.245	175	
5971.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.141.081	-	-	-	6.141.081	01 . 51	
01	RM	-	4.318.081	-	-	-	4.318.081	175	
04	PNBP	-	1.823.000	-	-	-	1.823.000	175	
5971.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	513.051	-	-	-	513.051	01 . 51	
01	RM	-	324.669	-	-	-	324.669	175	
04	PNBP	-	188.382	-	-	-	188.382	175	
5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	4.583.766	-	-	-	4.583.766		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5972.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.767.540	-	-	-	1.767.540	01 . 51	
01	RM	-	2.880	-	-	-	2.880	175	
04	PNBP	-	1.764.660	-	-	-	1.764.660	175	
5972.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.739.310	-	-	-	2.739.310	01 . 51	
01	RM	-	87.979	-	-	-	87.979	175	
04	PNBP	-	2.651.331	-	-	-	2.651.331	175	
5972.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	76.916	-	-	-	76.916	01 . 51	
01	RM	-	194	-	-	-	194	175	
04	PNBP	-	76.722	-	-	-	76.722	175	
5973	Peningkatan Data dan Infomasi	-	1.315.519	-	-	-	1.315.519		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5973.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.315.519	-	-	-	1.315.519	01 . 51	
01	RM	-	387.091	-	-	-	387.091	175	
04	PNBP	-	928.428	-	-	-	928.428	175	
5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	-	2.663.260	-	-	-	2.663.260		
5974.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.592.036	-	-	-	2.592.036	01 . 51	
01	RM	-	322.036	-	-	-	322.036	175	
04	PNBP	-	2.270.000	-	-	-	2.270.000	175	
5974.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	71.224	-	-	-	71.224	01 . 51	
01	RM	-	71.224	-	-	-	71.224	175	
5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	-	2.373.920	40.000	-	-	2.413.920		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



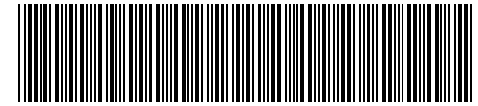
DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 10
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5975.AEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	432.862	-	-	-	432.862	01 . 51	
01	RM	-	155.952	-	-	-	155.952	175	
04	PNBP	-	276.910	-	-	-	276.910	175	
5975.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	345.028	-	-	-	345.028	01 . 51	
01	RM	-	99.318	-	-	-	99.318	175	
04	PNBP	-	245.710	-	-	-	245.710	175	
5975.AED	Perjanjian (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	75.408	-	-	-	75.408	01 . 51	
01	RM	-	42.318	-	-	-	42.318	175	
04	PNBP	-	33.090	-	-	-	33.090	175	
5975.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	476.854	40.000	-	-	516.854	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 11
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	36.360	-	-	-	36.360	175	
04 PNBP		-	440.494	40.000	-	-	480.494	175	
5975.BMB	Komunikasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	178.947	-	-	-	178.947	01 . 51	
01 RM		-	178.947	-	-	-	178.947	175	
5975.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	732.159	-	-	-	732.159	01 . 51	
01 RM		-	134.432	-	-	-	134.432	175	
04 PNBP		-	597.727	-	-	-	597.727	175	
5975.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	132.662	-	-	-	132.662	01 . 51	
01 RM		-	66.972	-	-	-	66.972	175	
04 PNBP		-	65.690	-	-	-	65.690	175	
5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	-	511.328	-	-	-	511.328		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

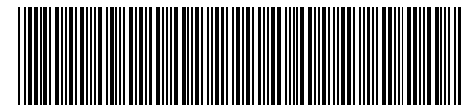
Halaman : II. 12
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	511.328	-	-	-	511.328	01 . 51	
01 RM		-	461.328	-	-	-	461.328	175	
04 PNBP		-	50.000	-	-	-	50.000	175	
5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	-	3.092.170	-	-	-	3.092.170		
5977.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.092.170	-	-	-	3.092.170	01 . 51	
01 RM		-	928.174	-	-	-	928.174	175	
04 PNBP		-	2.163.996	-	-	-	2.163.996	175	
JUMLAH		44.120.992	86.821.801	4.699.872	-	-	135.642.665		

Jakarta, 17 November 2021
Wakil Ketua KPPU

ttd.
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M
NIP -

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	422810	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	6.247.292	5.757.686	8.942.364	12.620.607	8.830.727	10.918.897	15.892.590	10.542.882	11.153.180	10.021.636	13.376.166	21.338.638	135.642.665
		BELANJA PEGAWAI	477.643	3.281.714	3.168.238	5.765.741	3.335.597	3.127.514	5.767.775	3.187.956	3.207.136	3.275.420	3.498.620	6.027.639	44.120.992
		BELANJA BARANG	5.769.635	2.475.958	5.774.112	6.854.852	5.495.117	7.291.369	8.047.555	7.197.011	7.704.656	6.733.380	9.532.988	13.945.169	86.821.801
		BELANJA MODAL	14	14	14	14	14	500.014	2.077.260	157.915	241.388	12.837	344.559	1.365.830	4.699.872
108.01.EG.3952		Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	203.957	248.603	245.306	229.114	237.164	237.164	237.016	236.487	234.443	260.641	278.360	329.711	2.977.964
108.01.EG.3953		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengawasan Kemitraan	203.957	248.603	245.306	229.114	237.164	237.164	237.016	236.487	234.443	260.641	278.360	329.711	2.977.964
108.01.EG.3955		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	95.514	151.144	257.541	90.673	90.230	278.921	417.951	560.717	154.125	95.100	82.430	71.254	2.345.600
108.01.EG.3955		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	95.514	151.144	257.541	90.673	90.230	278.921	417.951	560.717	154.125	95.100	82.430	71.254	2.345.600
108.01.EG.3956		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	256.024	244.470	263.675	240.076	237.026	691.591	738.444	636.003	387.632	969.882	1.283.032	951.744	6.899.600
108.01.EG.3956		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	256.024	244.470	263.675	240.076	237.026	691.591	738.444	636.003	387.632	969.882	1.283.032	951.744	6.899.600
108.01.EG.3957		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	270.428	270.428	270.245	270.396	266.104	391.171	342.373	367.533	333.663	182.523	193.389	374.484	3.532.739
108.01.EG.3957		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	270.428	270.428	270.245	270.396	266.104	391.171	342.373	367.533	333.663	182.523	193.389	374.484	3.532.739
108.01.EG.3958		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penilaian Merger dan Akuisi	126.616	277.276	366.385	223.906	169.851	359.781	280.151	112.530	281.465	127.584	103.758	234.259	2.663.563
108.01.EG.3958		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	126.616	277.276	366.385	223.906	169.851	359.781	280.151	112.530	281.465	127.584	103.758	234.259	2.663.563

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	108.01.EG.5162	52 BELANJA BARANG DAN BARANG Analisis Kebijakan Pemerintah	332.231	93.286	95.755	48.220	113.992	75.678	210.887	340.954	245.682	245.950	262.624	321.938	2.387.199
	108.01.EG.5194	52 BELANJA BARANG DAN BARANG Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	51.429	82.102	99.019	70.949	68.590	63.545	75.764	273.884	288.769	221.469	218.222	264.828	1.778.569
	108.01.EG.5275	52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	74.604	74.991	74.604	74.599	74.988	102.246	99.284	251.192	326.443	338.641	376.372	489.012	2.356.975
	108.01.WA.5971	52 BELANJA BARANG DAN BARANG Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	74.604	74.991	74.604	74.599	74.988	102.246	99.284	251.192	326.443	338.641	376.372	489.012	2.356.975
	108.01.WA.5972	51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG DAN BARANG 53 BELANJA MODAL Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	935.597	374.537	1.322.137	720.068	572.280	1.283.504	1.535.516	673.205	872.777	214.904	336.556	995.382	9.836.462
	108.01.WA.5973	52 BELANJA BARANG DAN BARANG Peningkatan Data dan Infromasi	935.597	374.537	1.322.137	720.068	572.280	1.283.504	1.535.516	673.205	872.777	214.904	336.556	995.382	9.836.462
	108.01.WA.5974	52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	3.601.280	3.781.917	5.443.248	10.207.447	6.564.332	6.930.753	11.144.310	6.051.809	6.175.403	5.115.627	7.335.549	13.932.356	86.284.031
			477.643	3.281.714	3.168.238	5.765.741	3.335.597	3.127.514	5.767.775	3.187.956	3.207.136	3.275.420	3.498.620	6.027.639	44.120.992
			3.123.638	500.203	2.275.010	4.441.706	3.228.735	3.303.239	3.299.295	2.708.804	2.733.165	1.835.207	3.502.689	6.551.475	37.503.167
			0	0	0	0	0	500.000	2.077.239	155.050	235.101	5.000	334.240	1.353.242	4.659.872
			8.952	9.883	32.653	33.851	34.017	61.540	253.588	306.897	690.325	739.836	930.548	1.481.677	4.583.766
			8.952	9.883	32.653	33.851	34.017	61.540	253.588	306.897	690.325	739.836	930.548	1.481.677	4.583.766
			8.666	10.343	38.884	53.414	34.362	24.535	133.568	52.987	79.005	226.584	516.192	136.979	1.315.519
			8.666	10.343	38.884	53.414	34.362	24.535	133.568	52.987	79.005	226.584	516.192	136.979	1.315.519
			33.534	24.887	54.540	36.561	37.384	69.635	105.477	319.964	326.881	512.559	525.204	616.634	2.663.260

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

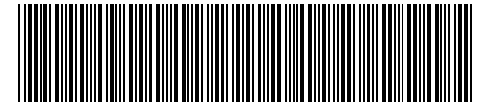
Halaman : III. 3
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108.01.WA.5975		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	33.534	24.887	54.540	36.561	37.384	69.635	105.477	319.964	326.881	512.559	525.204	616.634	2.663.260
		Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	58.232	53.358	62.726	58.511	60.071	79.322	111.220	154.482	321.109	349.158	514.677	591.053	2.413.920
108.01.WA.5976		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	58.219	53.344	62.712	58.497	60.057	79.308	111.200	151.617	314.822	341.322	504.358	578.464	2.373.920
		53 BELANJA MODAL	14	14	14	14	14	14	21	2.865	6.287	7.837	10.319	12.589	40.000
108.01.WA.5977		Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	18.004	1.788	34.152	21.613	59.145	51.176	42.650	35.574	32.855	44.851	53.123	116.396	511.328
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	18.004	1.788	34.152	21.613	59.145	51.176	42.650	35.574	32.855	44.851	53.123	116.396	511.328
		Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	172.222	58.673	281.494	241.209	211.191	218.334	164.392	168.664	402.603	376.326	366.132	430.931	3.092.170
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	172.222	58.673	281.494	241.209	211.191	218.334	164.392	168.664	402.603	376.326	366.132	430.931	3.092.170
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	28.000.000	24.000.000	3.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	110.000.000
		- PNBP (425812)	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	28.000.000	24.000.000	3.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	110.000.000

Jakarta, 17 November 2021
Wakil Ketua KPPU

ttd.
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M
NIP -

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
IV A. B L O K I R**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : [108] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : [01] Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [422810] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

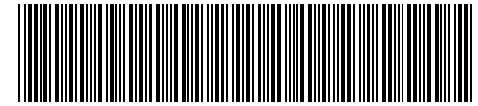
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Wakil Ketua KPPU

ttd.
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M
NIP -

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:5594-6618-5361-1006

Kementerian Negara/Lembaga : [108] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : [01] Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [422810] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

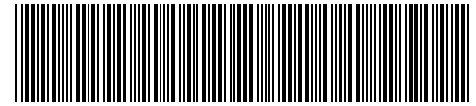
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
422810	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA		
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum		
5971.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	2.854.872
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Kendaraan operasional roda 4, 2 unit senilai Rp 706.515.000	Rp.	2.854.872

Jakarta, 17 November 2021
Wakil Ketua KPPU

ttd.
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M
NIP -



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 108.01.1.422810/2023**



DS:5083-5241-3762-6772

Revisi ke 06

Tanggal : 16 Agustus 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
 2. Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
- Sebesar : Rp. 115.106.034.000 (SERATUS LIMA BELAS MILIAR SERATUS ENAM JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	105.671.034.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	9.435.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 115.106.034.000

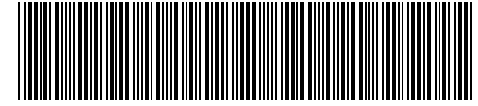
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023

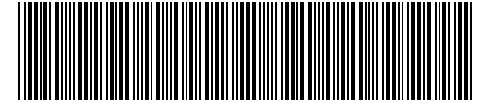


DS:5083-5241-3762-6772

Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	Rp.	23.668.972.000
EG.3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	Rp.	2.163.850.000
EG.3953	Pengawasan Kemitraan	Rp.	1.563.136.000
EG.3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	Rp.	2.289.576.000
EG.3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Rp.	2.878.518.000
EG.3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	Rp.	1.548.630.000
EG.3958	Penilaian Merger dan Akusisi	Rp.	1.621.295.000
EG.5162	Analisis Kebijakan Pemerintah	Rp.	1.111.290.000
EG.5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	Rp.	1.339.258.000
EG.5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	Rp.	9.153.419.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	91.437.062.000
WA.5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	Rp.	81.581.263.000
WA.5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Rp.	1.827.235.000
WA.5973	Peningkatan Data dan Informasi	Rp.	1.043.286.000
WA.5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	Rp.	1.749.153.000
WA.5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	Rp.	2.587.072.000
WA.5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	Rp.	506.041.000
WA.5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	Rp.	2.143.012.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 1

Program	:	108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha				23.668.972.000
Kegiatan	:	3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha				2.163.850.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3952.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.163.850.000
Rincian Output	:	01	PBB.001 Penelitian Pengawasan Persaingan Usaha	(PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.263.850.000
		02	PBB.002 Indeks Persepsi Persaingan Usaha	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	700.000.000
		03	PBB.003 Pengelolaan dan Pengembangan Basis Data	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan	:	3953	Pengawasan Kemitraan				1.563.136.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3953.QCE	Penanganan Perkara		9,00	Perkara, Berkas Perkara	1.563.136.000
Rincian Output	:	01	QCE.001 Hasil Klarifikasi Pengawasan Kemitraan	(PN)	5,00	Berkas Perkara	630.712.000
		02	QCE.002 Hasil Penelitian Inisiatif Pengawasan Kemitraan	(PN)	1,00	Berkas Perkara	150.200.000
		03	QCE.003 Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan	(PN)	2,00	Perkara	586.116.000
		04	QCE.004 Hasil Monitoring Peringatan Tertulis Pengawasan Kemitraan	(PN)	1,00	Perkara	196.108.000
Kegiatan	:	3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU				2.289.576.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 3	:	3955.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		8,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	845.381.000
Rincian Output	:	01	PBB.001 Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah I Medan	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	108.276.000
		02	PBB.002 Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah II Lampung	(PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	152.419.000
		03	PBB.003 Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah III Bandung	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	82.619.000
		04	PBB.004 Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	77.784.000
		05	PBB.005 Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah V Balikpapan	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	135.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 2

Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

06	PBB.006	Kajian Pelaku Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	209.283.000
07	PBB.007	Kajian pelaku usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	80.000.000

Klasifikasi Rincian Output 4 : 3955.QCE Penanganan Perkara 7,00 Perkara, Berkas Perkara 719.184.000

Rincian Output	:	01	QCE.001	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah I Medan	(PN)	1,00	Berkas Perkara	103.606.000
		02	QCE.002	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah II Lampung	(PN)	1,00	Berkas Perkara	102.418.000
		03	QCE.003	Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pesaingan Usaha di Kantor Wilayah III Bandung	(PN)	1,00	Berkas Perkara	74.186.000
		04	QCE.004	Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah IV Surabaya	(PN)	1,00	Berkas Perkara	77.784.000
		05	QCE.005	Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah V Balikpapan	(PN)	1,00	Berkas Perkara	160.000.000
		06	QCE.006	Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Kantor Wilayah VI Makassar	(PN)	1,00	Berkas Perkara	131.190.000
		07	QCE.007	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha di Kantor Wilayah VII Yogyakarta	(PN)	1,00	Berkas Perkara	70.000.000

Klasifikasi Rincian Output 5 : 3955.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 13,00 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota 725.011.000

Rincian Output	:	01	UBA.001	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil I Medan	(PN)	2,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	94.163.000
		02	UBA.002	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil II Lampung	(PN)	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	51.209.000
		03	UBA.003	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/kota di Kanwil III Bandung	(PN)	2,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	85.000.000
		04	UBA.004	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil IV Surabaya	(PN)	2,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	150.477.000
		05	UBA.005	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil V Balikpapan	(PN)	2,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	148.915.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 3

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota

06	UBA.006	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VI Makassar	(PN)	2.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	103.442.000
07	UBA.007	Advokasi Persaingan Usaha dan/atau Kemitraan ke Prov/Kab/Kota di Kanwil VII Yogyakarta	(PN)	2.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	91.805.000

Kegiatan : 3956 Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat 2.878.518.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

Klasifikasi Rincian Output 6 : 3956.QCE Penanganan Perkara 40,00 Perkara, Berkas Perkara 2.878.518.000

Rincian Output	: 01	QCE.001	Hasil Klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha yang terselesaikan	(PN)	29.00	Berkas Perkara	1.501.668.000
	02	QCE.002	Hasil Penelitian Perkara Inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha yang terselesaikan	(PN)	3.00	Berkas Perkara	336.000.000
	03	QCE.003	Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang terselesaikan	(PN)	6.00	Berkas Perkara	910.850.000
	04	QCE.004	Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha	(PN)	2.00	Perkara	130.000.000

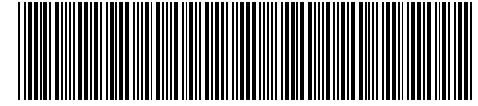
Kegiatan : 3957 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat 1.548.630.000

:

Klasifikasi Rincian Output 7 : 3957.QCE Penanganan Perkara 16,00 Perkara, Berkas Perkara 1.548.630.000

Rincian Output	: 01	QCE.001	Hasil Pemberkasan Perkara Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	(PN)	6.00	Berkas Perkara	426.973.000
	02	QCE.002	Hasil Penuntutan terhadap Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi	(PN)	7.00	Perkara	720.000.000
	03	QCE.003	Hasil Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU	(PN)	3.00	Perkara	401.657.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



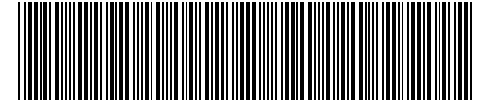
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	3958	Penilaian Merger dan Akuisisi				1.621.295.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	8	:	3958.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	6,00	Perkara, Berkas Perkara	467.056.000	
Rincian Output	:	01	QCD.002	Hasil Penyelidikan Dugaan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi (PN)	6,00	Berkas Perkara	467.056.000	
Klasifikasi Rincian Output	9	:	3958.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	15,00	Badan Usaha, Laporan	1.154.239.000	
Rincian Output	:	01	QIH.001	Hasil Klarifikasi dan Penelitian Notifikasi Merger dan Akuisisi (PN)	10,00	Laporan	727.239.000	
			02	QIH.002	Penetapan Notifikasi yang Memuat Pendapat KPPU atas Hasil Penilaian Merger dan Akuisisi (PN)	5,00	Laporan	427.000.000
Kegiatan	:	5162	Analisis Kebijakan Pemerintah				1.111.290.000	
	:							
Klasifikasi Rincian Output	10	:	5162.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	6,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.011.290.000	
Rincian Output	:	01	PBB.001	Kajian Kebijakan Pemerintah Pada Kementerian / Lembaga (PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	511.420.000	
			02	PBB.002	Surat Saran Hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah terkait Persaingan Usaha (PN)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	264.830.000
			03	PBB.003	Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Persaingan Usaha (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	235.040.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	5162.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	100.000.000	
Rincian Output	:	01	UAB.001	Sistem Aplikasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) berbasis Web (PN)	1,00	Sistem Informasi	100.000.000	
Kegiatan	:	5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan				1.339.258.000	
	:							

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	5194.PEB	Forum		1,00	forum	25.000.000
Rincian Output		:	01	PEB.001	Forum Instrumen Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan (PN)	1,00	forum	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	5194.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		5,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	362.180.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga (PN)	2,00	Lembaga	161.076.000
Rincian Output		:	02	QDB.002	Advokasi Kemitraan ke Lembaga (PN)	3,00	Lembaga	201.104.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	5194.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		9,00	Badan usaha, Miliar USD	952.078.000
Rincian Output		:	01	QDH.001	Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha (PN)	7,00	Badan usaha	629.968.000
Rincian Output		:	02	QDH.002	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha (PN)	2,00	Badan usaha	322.110.000
Kegiatan		:	5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha				9.153.419.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	15	:	5275.QCE	Penanganan Perkara		30,00	Perkara, Berkas Perkara	9.153.419.000
Rincian Output		:	01	QCE.001	Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Persaingan Usaha (PN)	12,00	Perkara	2.673.419.000
Rincian Output		:	02	QCE.002	Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Persaingan Usaha (PN)	9,00	Perkara	5.000.000.000
Rincian Output		:	03	QCE.003	Putusan Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha (PN)	9,00	Perkara	1.480.000.000
Program		:	108.01.WA	Program Dukungan Manajemen				91.437.062.000
Kegiatan		:	5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum				81.581.263.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5971.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	74.367.192.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	631.118.000
		:	02	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	1.025.214.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	777.198.000
		:	04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	360.819.000
		:	05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	71.572.843.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5971.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	41,00	Unit, m2, Paket	677.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	40,00	Unit	575.550.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	101.450.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5971.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	417,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	6.275.466.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	417,00	Layanan	6.275.466.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	5971.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	21,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	261.605.000
Rincian Output		:	01	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	21,00	Dokumen	261.605.000
Kegiatan		:	5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			1.827.235.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	5	:	5972.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	360,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.827.235.000
Rincian Output		:	01	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	360,00	Orang	1.827.235.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 7

Kegiatan	:	5973	Peningkatan Data dan Infromasi			1.043.286.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	6	:	5973.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.043.286.000	
Rincian Output	:	01	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	1.043.286.000	
Kegiatan	:	5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi			1.749.153.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	7	:	5974.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.749.153.000	
Rincian Output	:	01	EBA.002	Layanan Pelaksanaan Eksekusi	1,00	Layanan	815.655.000	
			02	EBA.957	Layanan Hukum	2,00	Layanan	867.100.000
			03	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1,00	Layanan	66.398.000
Kegiatan	:	5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga			2.587.072.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	8	:	5975.AEB	Forum	7,00	forum	724.708.000	
Rincian Output	:	01	AEB.001	Forum pemenuhan target cetak biru ASEAN Bidang Persaingan Usaha Tahun 2021	5,00	forum	296.456.000	
			02	AEB.002	Forum Pemanfaatan keanggotaan KPPU di Komite Persaingan Usaha OECD	2,00	forum	428.252.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	5975.AEC	Kerja sama	6,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	603.048.000	
Rincian Output	:	01	AEC.001	Kerja Sama antara KPPU dengan Lembaga Pemerintah/Perguruan Tinggi	6,00	Kesepakatan	603.048.000	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



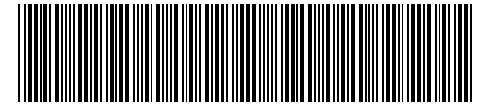
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 8

Klasifikasi Rincian Output	10	:	5975.AED	Perjanjian	2,00	perjanjian	152.992.000
Rincian Output		:	01	AED.001 Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia - Uni Eropa bidang Persaingan Usaha	2,00	perjanjian	152.992.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	5975.BMA	Data dan Informasi Publik	2,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	237.714.000
Rincian Output		:	01	BMA.001 Layanan Pengelolaan Perpustakaan dan Jurnal Persaingan Usaha	1,00	layanan	204.464.000
Rincian Output		:	02	BMA.002 Layanan PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) di KPPU	1,00	layanan	33.250.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	5975.BMB	Komunikasi Publik	1,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	269.547.000
Rincian Output		:	01	BMB.001 Pelaksanaan Strategi Komunikasi dan Layanan edukasi publik	1,00	layanan	269.547.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	5975.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	599.063.000
Rincian Output		:	01	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	599.063.000
Kegiatan		:	5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU			506.041.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	14	:	5976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	506.041.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Non Audit Internal	5,00	Laporan	428.194.000
Rincian Output		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	2,00	Laporan	77.847.000
Kegiatan		:	5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU			2.143.012.000
		:					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I A. 9

Klasifikasi Rincian Output	15	:	5977.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	14,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.143.012.000	
Rincian Output		:	01	EBD.001	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan	2.00	Laporan	232.279.000
		:	02	EBD.002	Layanan Penyelarasan Kegiatan dan Revisi Anggaran	1.00	Layanan	62.324.000
		:	03	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.00	Dokumen	1.169.574.000
		:	04	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.00	Dokumen	79.612.000
		:	05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Laporan	599.223.000

Jakarta, 30 November 2022
Ketua KPPU

ttd.
M. Afif Hasbullah
NIP -

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023

I B. SUMBER DANA



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
 Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : I B. 1

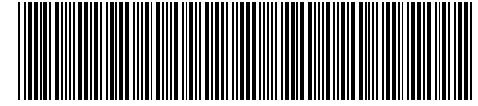
		Pagu	Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	115.106.034.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	105.671.034.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	9.435.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
422810	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	45.444.622	68.984.412	677.000	-	-	115.106.034		
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	-	23.668.972	-	-	-	23.668.972		
3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	-	2.163.850	-	-	-	2.163.850		
3952.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.163.850	-	-	-	2.163.850	01 . 51	
01	RM	-	1.663.850	-	-	-	1.663.850	175@	
04	PNBP	-	500.000	-	-	-	500.000	175	
3953	Pengawasan Kemitraan	-	1.563.136	-	-	-	1.563.136		
3953.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.563.136	-	-	-	1.563.136	01 . 51	
01	RM	-	1.283.136	-	-	-	1.283.136	175	
04	PNBP	-	280.000	-	-	-	280.000	175	
3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	-	2.289.576	-	-	-	2.289.576		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



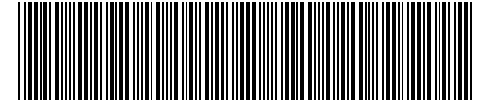
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3955.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	845.381	-	-	-	845.381	01 . 51	
01	RM	-	795.381	-	-	-	795.381	175	
04	PNBP	-	50.000	-	-	-	50.000	175	
3955.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	719.184	-	-	-	719.184	01 . 51	
01	RM	-	719.184	-	-	-	719.184	175	
3955.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	725.011	-	-	-	725.011	01 . 51	
01	RM	-	455.011	-	-	-	455.011	175	
04	PNBP	-	270.000	-	-	-	270.000	175	
3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	-	2.878.518	-	-	-	2.878.518		
3956.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.878.518	-	-	-	2.878.518	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.698.518	-	-	-	1.698.518	175@	
04 PNBP		-	1.180.000	-	-	-	1.180.000	175	
3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	-	1.548.630	-	-	-	1.548.630		
3957.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.548.630	-	-	-	1.548.630	01 . 51	
01 RM		-	768.630	-	-	-	768.630	175	
04 PNBP		-	780.000	-	-	-	780.000	175	
3958	Penilaian Merger dan Akuisisi	-	1.621.295	-	-	-	1.621.295		
3958.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	467.056	-	-	-	467.056	01 . 51	
01 RM		-	467.056	-	-	-	467.056	175@	
3958.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.154.239	-	-	-	1.154.239	01 . 51	
01 RM		-	374.239	-	-	-	374.239	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	780.000	-	-	-	780.000	175@	
5162	Analisis Kebijakan Pemerintah	-	1.111.290	-	-	-	1.111.290		
5162.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.011.290	-	-	-	1.011.290	01 . 51	
01	RM	-	781.290	-	-	-	781.290	175@	
04	PNBP	-	230.000	-	-	-	230.000	175	
5162.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	100.000	-	-	-	100.000	01 . 51	
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	175	
04	PNBP	-	50.000	-	-	-	50.000	175	
5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	-	1.339.258	-	-	-	1.339.258		
5194.PEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	25.000	-	-	-	25.000	01 . 51	
04	PNBP	-	25.000	-	-	-	25.000	175	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



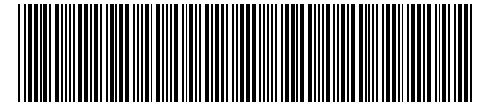
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5194.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	362.180	-	-	-	362.180	01 . 51	
01	RM	-	112.090	-	-	-	112.090	175	
04	PNBP	-	250.090	-	-	-	250.090	175	
5194.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	952.078	-	-	-	952.078	01 . 51	
01	RM	-	629.968	-	-	-	629.968	175@	
04	PNBP	-	322.110	-	-	-	322.110	175	
5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	-	9.153.419	-	-	-	9.153.419		
5275.QCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.153.419	-	-	-	9.153.419	01 . 51	
01	RM	-	5.855.419	-	-	-	5.855.419	175@	
04	PNBP	-	3.298.000	-	-	-	3.298.000	175	
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen	45.444.622	45.315.440	677.000	-	-	91.437.062		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



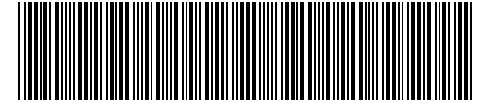
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	45.444.622	35.459.641	677.000	-	-	81.581.263		
5971.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	45.444.622	28.922.570	-	-	-	74.367.192	01 . 51	
01 RM		45.444.622	28.922.570	-	-	-	74.367.192	175@	
5971.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	677.000	-	-	677.000	01 . 51	
01 RM		-	-	677.000	-	-	677.000	175	
5971.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.275.466	-	-	-	6.275.466	01 . 51	
01 RM		-	6.275.466	-	-	-	6.275.466	175@	
5971.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	261.605	-	-	-	261.605	01 . 51	
01 RM		-	261.605	-	-	-	261.605	175	
5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	1.827.235	-	-	-	1.827.235		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5972.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.827.235	-	-	-	1.827.235	01 . 51	
01	RM	-	1.577.235	-	-	-	1.577.235	175@	
04	PNBP	-	250.000	-	-	-	250.000	175	
5973	Peningkatan Data dan Infromasi	-	1.043.286	-	-	-	1.043.286		
5973.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.043.286	-	-	-	1.043.286	01 . 51	
01	RM	-	1.043.286	-	-	-	1.043.286	175	
5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	-	1.749.153	-	-	-	1.749.153		
5974.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.749.153	-	-	-	1.749.153	01 . 51	
01	RM	-	1.499.153	-	-	-	1.499.153	175@	
04	PNBP	-	250.000	-	-	-	250.000	175	
5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	-	2.587.072	-	-	-	2.587.072		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



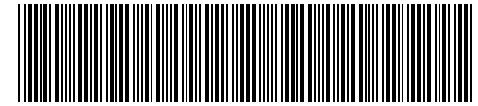
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5975.AEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	724.708	-	-	-	724.708	01 . 51	
01	RM	-	395.504	-	-	-	395.504	175	
04	PNBP	-	329.204	-	-	-	329.204	175	
5975.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	603.048	-	-	-	603.048	01 . 51	
01	RM	-	336.648	-	-	-	336.648	175	
04	PNBP	-	266.400	-	-	-	266.400	175	
5975.AED	Perjanjian (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	152.992	-	-	-	152.992	01 . 51	
01	RM	-	95.196	-	-	-	95.196	175	
04	PNBP	-	57.796	-	-	-	57.796	175	
5975.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	237.714	-	-	-	237.714	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



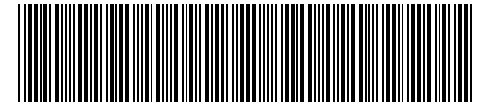
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	57.300	-	-	-	57.300	175	
04 PNB		-	180.414	-	-	-	180.414	175	
5975.BMB	Komunikasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	269.547	-	-	-	269.547	01 . 51	
01 RM		-	269.547	-	-	-	269.547	175	
5975.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	599.063	-	-	-	599.063	01 . 51	
01 RM		-	513.077	-	-	-	513.077	175@	
04 PNB		-	85.986	-	-	-	85.986	175	
5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	-	506.041	-	-	-	506.041		
5976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	506.041	-	-	-	506.041	01 . 51	
01 RM		-	506.041	-	-	-	506.041	175	
5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	-	2.143.012	-	-	-	2.143.012		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kewenangan : (KP)

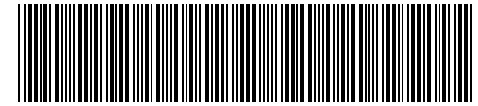
Halaman : II. 10
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
5977.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.143.012	-	-	-	2.143.012	01 . 51	
01 RM		-	2.143.012	-	-	-	2.143.012	175@	
JUMLAH		45.444.622	68.984.412	677.000	-	-	115.106.034		

Jakarta, 30 November 2022
Ketua KPPU

ttd.
M. Afif Hasbullah
NIP -

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



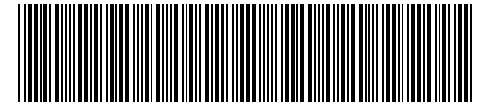
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	422810	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.939.030	11.570.713	9.640.589	11.534.937	9.672.562	11.892.748	8.342.733	7.946.708	9.882.273	7.632.454	8.264.209	12.787.078	115.106.034
		BELANJA PEGAWAI	0	3.191.356	3.610.442	5.758.719	3.327.918	5.751.996	3.227.787	3.168.187	3.201.887	3.350.924	3.350.600	7.504.806	45.444.622
		BELANJA BARANG	5.939.030	8.363.357	6.030.148	5.746.059	6.344.644	5.862.251	5.059.945	4.703.020	6.458.545	4.281.530	4.913.609	5.282.271	68.984.412
		BELANJA MODAL	0	16.000	0	30.159	0	278.501	55.000	75.500	221.840	0	0	0	677.000
108.01.EG.3952		Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	179.898	179.898	179.898	179.898	266.502	179.898	179.898	179.898	179.897	179.839	178.823	99.504	2.163.850
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	179.898	179.898	179.898	179.898	266.502	179.898	179.898	179.898	179.897	179.839	178.823	99.504	2.163.850
108.01.EG.3953		Pengawasan Kemitraan	118.494	168.866	400.265	188.210	364.483	155.402	53.976	26.796	26.627	26.683	29.951	3.383	1.563.136
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	118.494	168.866	400.265	188.210	364.483	155.402	53.976	26.796	26.627	26.683	29.951	3.383	1.563.136
108.01.EG.3955		Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	104.936	201.105	245.300	179.785	312.250	288.678	243.543	181.103	144.303	156.177	145.471	86.925	2.289.576
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	104.936	201.105	245.300	179.785	312.250	288.678	243.543	181.103	144.303	156.177	145.471	86.925	2.289.576
108.01.EG.3956		Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	209.109	201.435	200.384	201.551	372.886	196.176	203.103	185.530	112.803	111.292	285.981	598.267	2.878.518
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	209.109	201.435	200.384	201.551	372.886	196.176	203.103	185.530	112.803	111.292	285.981	598.267	2.878.518
108.01.EG.3957		Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	85.093	108.141	133.410	187.901	113.509	117.930	165.538	124.048	159.638	135.846	146.304	71.273	1.548.630
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	85.093	108.141	133.410	187.901	113.509	117.930	165.538	124.048	159.638	135.846	146.304	71.273	1.548.630
108.01.EG.3958		Penilaian Merger dan Akuisisi	141.225	117.677	147.886	160.434	198.493	169.977	151.344	101.590	106.202	106.429	111.568	108.470	1.621.295

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108.01.EG.5162		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	141.225	117.677	147.886	160.434	198.493	169.977	151.344	101.590	106.202	106.429	111.568	108.470	1.621.295
		Analisis Kebijakan Pemerintah	40.173	68.730	150.588	80.601	50.563	152.102	121.287	125.115	73.229	69.968	65.382	113.554	1.111.290
108.01.EG.5194		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	40.173	68.730	150.588	80.601	50.563	152.102	121.287	125.115	73.229	69.968	65.382	113.554	1.111.290
		Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	56.248	64.938	73.942	108.309	188.507	126.626	121.286	119.573	119.823	119.703	101.054	139.250	1.339.258
108.01.EG.5275		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	56.248	64.938	73.942	108.309	188.507	126.626	121.286	119.573	119.823	119.703	101.054	139.250	1.339.258
		Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	798.660	1.388.737	1.195.558	724.814	870.743	671.913	661.023	645.352	632.988	616.184	556.936	390.510	9.153.419
108.01.WA.5971		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	798.660	1.388.737	1.195.558	724.814	870.743	671.913	661.023	645.352	632.988	616.184	556.936	390.510	9.153.419
		Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	3.650.923	8.398.047	6.133.369	8.871.153	6.164.545	9.143.408	5.592.065	5.407.701	7.435.167	5.257.361	5.725.911	9.801.613	81.581.263
108.01.WA.5972		51 BELANJA PEGAWAI	0	3.191.356	3.610.442	5.758.719	3.327.918	5.751.996	3.227.787	3.168.187	3.201.887	3.350.924	3.350.600	7.504.806	45.444.622
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.650.923	5.190.691	2.522.927	3.082.275	2.836.628	3.112.910	2.309.277	2.164.013	4.011.440	1.906.438	2.375.312	2.296.806	35.459.641
		53 BELANJA MODAL	0	16.000	0	30.159	0	278.501	55.000	75.500	221.840	0	0	0	677.000
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	49.960	85.974	207.539	103.225	163.124	173.403	148.592	176.704	139.726	130.000	190.815	258.173	1.827.235
108.01.WA.5973		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	49.960	85.974	207.539	103.225	163.124	173.403	148.592	176.704	139.726	130.000	190.815	258.173	1.827.235
		Peningkatan Data dan Infromasi	24.607	41.098	48.704	28.207	66.977	24.607	50.347	24.907	72.970	72.970	79.567	508.328	1.043.286
108.01.WA.5974		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	24.607	41.098	48.704	28.207	66.977	24.607	50.347	24.907	72.970	72.970	79.567	508.328	1.043.286
		Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi	104.466	170.905	149.427	148.393	132.309	139.443	164.822	148.810	164.758	151.682	151.192	122.944	1.749.153

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : (108) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : (01) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (422810) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : III. 3
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108.01.WA.5975		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	104.466	170.905	149.427	148.393	132.309	139.443	164.822	148.810	164.758	151.682	151.192	122.944	1.749.153
		Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga	135.417	135.417	135.417	135.417	175.517	134.427	261.888	291.767	277.878	285.756	304.897	313.274	2.587.072
108.01.WA.5976		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	135.417	135.417	135.417	135.417	175.517	134.427	261.888	291.767	277.878	285.756	304.897	313.274	2.587.072
		Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU	39.839	39.760	39.678	39.678	39.671	39.435	39.484	36.986	37.990	44.676	53.116	55.729	506.041
108.01.WA.5977		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	39.839	39.760	39.678	39.678	39.671	39.435	39.484	36.986	37.990	44.676	53.116	55.729	506.041
		Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU	199.984	199.984	199.225	197.363	192.482	179.324	184.538	170.827	198.274	167.887	137.242	115.882	2.143.012
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	199.984	199.984	199.225	197.363	192.482	179.324	184.538	170.827	198.274	167.887	137.242	115.882	2.143.012
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.166	3.609.174
		- PNBP (425692)	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.950.000
		- PNBP (425812)	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.666	3.446.674	41.360.000

Jakarta, 30 November 2022
Ketua KPPU

ttd.
M. Afif Hasbullah
NIP -

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
IV A. B L O K I R**



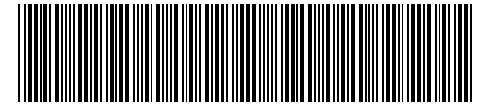
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : [108] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : [01] Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [422810] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
422810	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.500
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 3.468.899		Data dukung tidak lengkap
	52 Belanja Barang Rp. 3.468.899		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	5162	Analisis Kebijakan Pemerintah
3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	5162.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
3952.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.000		Automatic Adjustment
	Automatic Adjustment		Disposisi: Automatic Adjustment
	Disposisi: Automatic Adjustment	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.428
3956.QCE	Penanganan Perkara		Automatic Adjustment
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 167.000	5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan
	Automatic Adjustment	5194.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	Disposisi: Automatic Adjustment	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
3958	Penilaian Merger dan Akusisi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 67.428
3958.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha		Automatic Adjustment
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.573	5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha
	Automatic Adjustment	5275.QCE	Penanganan Perkara
	Disposisi: Automatic Adjustment	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
3958.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 884.658
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.500		Disposisi: Automatic Adjustment
	Automatic Adjustment	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.600
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)		Automatic Adjustment
			Disposisi: Automatic Adjustment

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
IV A. B L O K I R**



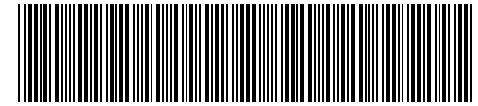
DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : [108] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : [01] Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [422810] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
108.01.WA 5971	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment Program Dukungan Manajemen	5971.EBA	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjusment Disposisi: Automatic Adjustment
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjusment Disposisi: Automatic Adjustment		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment
5971.EBC	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal	5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi
5971.EBC	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment Layanan Manajemen SDM Internal	5974.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
5972	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Buka Blokir Disposisi: Automatic Adjustment Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga
5972.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5975.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjusment Disposisi: Automatic Adjustment	5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Automatic Adjusment	5977.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
IV A. B L O K I R**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : [108] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : [01] Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [422810] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

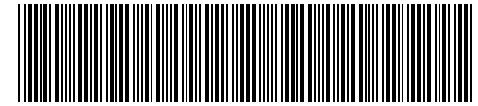
Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 30 November 2022
Ketua KPPU

ttd.
M. Afif Hasbullah
NIP -

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 108.01.1.422810/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:5083-5241-3762-6772

Kementerian Negara/Lembaga : [108] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Unit Organisasi : [01] Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [422810] KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Ketua KPPU

ttd.
M. Afif Hasbullah
NIP -